DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROV.SULAWESI SELATAN

RENCANA KERJA

2024

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mengizinkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Renja SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 schingga dapat tersusun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Renja-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 dengan tetap memperhatikan issu-issu lingkungan hidup dan kehutanan yang berkembang melalui Musyawarah Forum SKPD pada tahun 2023.

Terdapat empat tujuan yang akan dicapai pada tahun 2024 yaitu 1) meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah, 2) meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan, 3) menurunkan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta meningkatkan adaptasi dan mitigasi perubahan iklm, 4) meningkatkan pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan, schingga rencana kerja ini menjadi acuan dalam penyusunan dokumen penganggaran (Rencana Kerja dan Anggaran) pada tahun 2024 agar terwujud sinkronisasi dan konsistensi perencanaan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan saran dan masukan, schingga Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024, tersusun dengan baik.

Makassar, Juli 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Prov. Sulawesi Selatan

Ir. ANDI HASBI, M.T.
Pangkat Pembina Utama Madya
NIP. 19650427 199203 1009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

Daftar Diagram iv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 8

2.1 Evaluasi Renja Dinas Kehutanan Prov. Sulsel tahun 2022 8

2.2 Analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 36

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah 46

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD 47

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masayarakat 67

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 69

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional 69

3.2 Kebijakan Kemnterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 70

3.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 72

3.4 Sasaran Pembangunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 75

3.5 Program dan Kegiatan 77

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan 85

BAB V Penutup 115

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan 115

5.2 Rencana tindak lanjut 115

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Target dan realisasi tujuan dan sasaran urusan kehutanan tahun 2022	9
Tabel 2	Target dan realisasi tujuan dan sasaran urusan Lingkungan Hidup tahun 2022	10
Tabel 3	Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra perangkat daerah Sampai dengan tahun 2022	11
Tabel 4	Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Sulsel.....	38
Tabel 5	Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024	48
Tabel 6	Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2024	67
Tabel 7	Sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024	72
Tabel 8	Target kinerja prioritas pembangunan daerah tahun 2024	74
Tabel 9	Keterkaitan RPD dan Rencana Strategis	75
Tabel 10	Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024.....	76
Tabel 11	Rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah Tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.....	86

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1	Perkembangan perhutanan sosial	39
Diagram 2	Kelompok tani hutan	40
Diagram 3	Kerusakan kawasan hutan	41
Diagram 4	Rehabilitasi Hutan dan Lahan.....	42
Diagram 5	Kontribusi PDRB sektor kehutanan terhadap PDRB sulsel.....	43
Diagram 6	Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan.....	44
Diagram 7	Luas kawasan hutan Provinsi Sulawesi Selatan	45
Diagram 8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sulsel	46

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan daerah otonom baru, bahwa untuk Gubernur yang masa jabatannya berakhir tahun 2023 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah 2024–2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2024 – 2026. Sebagai turunan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah maka masing – masing perangkat daerah juga diwajibkan menyusun dokumen Renja yang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional

Perencanaan pembangunan yang baik akan mampu menjamin terlaksananya pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu. Mewujudkan hal tersebut diperlukan perencanaan yang logis, rasional, komprehensif dan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Perencanaan yang sistematis akan memberi acuan yang jelas dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Tema pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 yaitu “Peningkatan pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan yang inklusif” dengan prioritas pembangunan sebagai berikut 1) peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 2) peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 3) peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4) peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 5) pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan 6)

pembentukan karakter dan akhlaq sdm yang berintegritas, religious dan loyal serta profesional.

Merujuk pada prioritas pembangunan daerah tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 sebagai dokumen perencananan pembangunan tahunan dan penjabaran rencana strategis perangkat daerah tahun 2024-2026 mendukung pada prioritas pembangunan peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif, Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata dan Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Keterkaitan rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah, secara struktur memiliki keterkaitan yang satu sama lain saling mendukung dan menjadi sistem perencanaan pembangunan daerah. Adapun keterkaitan antara dokumen perencanaan sebagai berikut :

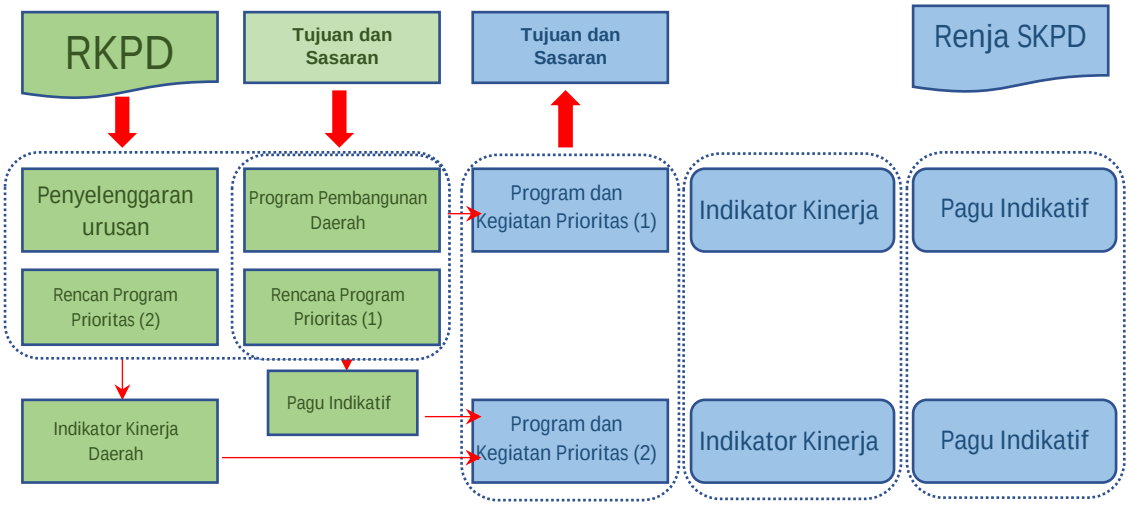

Rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2024, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan kehutanan disusun melalui koordinasi, sinergitas dengan pemangku kepentingan. Program strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan untuk pencapaian sasaran RKPD tahun 2024 yaitu menurunnya angka kemiskinan, dan terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Rencana kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 berorientasi pada tujuan 1) meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan 2) menurunkan kerusakan dan pencemaran lingkungan

serta meningkatkan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 3) meningkatkan pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan. Sasaran prioritas yang memiliki keterkaitan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 adalah 1) meningkatnya akses kelola hutan oleh kelompok tani mandiri sebagai bagian dari upaya menurunkan angka kemiskinan 2) menurunnya potensi emisi GRK sektor limbah dan sektor kehutanan.

Keterkaitan rencana pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan rencana pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam mendukung kelestarian lingkungan mencakup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan penurunan emisi GRK dari sektor limbah dan sektor kehutanan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam RKPD tahun 2024 menargetkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 73,57 sedangkan KLHK menargetkan secara nasional sebesar 69,74 *(Renstra KLHK 2020-2024*). Dalam pencapaianya peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2024 sesuai tugas dan fungsinya, menargetkan Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 57,03 Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 89,45 Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sebesar 85,68 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKLH) sebesar 55,49. Terkait penurunan emisi GRK dari sektor limbah dan sektor kehutanan tahun 2024, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menargetkan penurunan GRK dari sektor limbah sebesar 0,84 % dan penurunan GRK dari sektor kehutanan sebesar 242.044 ton co2 eq. Sedangkan KLHK menargetkan penurunan emisi GRK dari sektor limbah dan kehutanan sebesar 17,47 %.

Oleh karena itu, Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional dan disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta menjadi pedomam dalam penyusuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059)
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubatan atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028.

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri dalam negeri Nomir 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
20. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 62 tahun 2011 tentang Tata Cata Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
21. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
22. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 59 Tahun

2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sulawesi Selatan

23. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru
25. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
26. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 disusun dengan maksud untuk sebagai pedoman dan acuan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam rangka mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.
2. Tujuan
   a. Menetapkan program dan kegiatan prioritas yang akan dibiayai melalui APBD Propinsi maupun melalui DAK tahun 2024
   b. Acuan dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024
   c. Sebagai tolok ukur penilaian/evaluasi Kinerja Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Kerja

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

Bab ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran rencana kerja perangkat daerah, program dan kegiatan

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini memuat indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat

Bab V. Penutup

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan rencana kerja serta kaidah pelaksanaan rencana kerja, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai. Pertimbangan dan arahan masukan terhadap pencapaian program kerja untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang sekaligus penentuan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 sebagai berikut :

2.1 Evaluasi Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022

Evaluasi rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 terbagi atas urusan kehutanan dan urusan lingkungan hidup :

Urusan Kehutanan

a. Tujuan dan sasaran urusan kehutanan meliputi :

1. Tujuan 1 : Mengoptimalkan pengelolaan kawasan hutan
   - Sasaran 1.1 : Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan
   - Sasaran 1.2 : Meningkatnya kontribusi kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi
   - Sasaran 1.3 : Meningkatnya akses legal masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial dan konservasi sumberdaya alam hayati
   - Sasaran 1.4 : Terjaganya fungsi dan legalitas kawasan hutan
2. Tujuan 2 : Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah
   - Sasaran 2.1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan, dan pengelolaan keuangan perangkat daerah

Target dan realisasi tujuan dan sasaran sesuai rencana kerja tahun 2022, tersaji pada tabel berikut :

Tabel 1

Target dan realisasi tujuan dan sasaran urusan kehutanan tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target tahun 2022	Realisasi tahun 2022	Persen
1. Mengoptimalkan pengelolaan kawasan hutan		Luas pengelolaan kawasan hutan kewenangan provinsi	1.780.029 ha	1.780.029 ha	100
	1.1 Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan	58,66	55,46	94,54
	1.2 Meningkatnya kontribusi kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi	Persentase kontribusi PDRB kehutanan terhadap PDRB Sulsel	0,07	0,05	71,43
		Luas pemanfaatan kawasan hutan pada hutan produksi	12.000 ha	75.387,35 ha	628,28
	1.3 Meningkatnya akses legal masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial dan konservasi sumberdaya alam hayati	Persentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi	7,89 %	11,05 %	140,05
		Persentase jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (appendix) CITES kewenangan provinsi yang terdata	15 %	27,08 %	180,56
	1.4 Terjaganya fungsi dan legalitas kawasan hutan	Persentase luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya	64,67 %	68,20 %	105,46
		Jumlah kesatuan pengelolaan hutan	24 KPH	24 KPH	100
2. Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah		Tingkat akuntabilitas kinerja	75 %	77 %	102,67
	2.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Nilai Sakip OPD	75	77	102,67
		Persentase ASN nilai Sakip kategori Baik	90 %	100 %	111,11
		Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan)	90 %	98,20 %	109,11

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target tahun 2022	Realisasi tahun 2022	Persen
		Persentase temuan material	2 %	0,0016 %	199,92

Tabel 2

Target dan realisasi tujuan dan sasaran urusan lingkungan hidup tahun 2022

Sasaran	Indikator	Target tahun 2022	Realisasi tahun 2022	Persen
Meningkatnya efektifitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan hidup	72,63	74,17	102,12
	2. Indeks kualitas air	54,72	57,79	105,61
	3. Indeks kualitas udara	88,97	90,35	101,55
	4. Indeks kualitas air laut	71,40	85,59	119,87
	5. Persentase peningkatan penanganan kerusakan lingkungan	57 %	57 %	100,00
	6. Persentase kinerja penurunan beban pencemaran dari sumber tertentu	25 %	27 %	108,00
Menurunnya emisi gas rumah kaca (sektor limbah)	7. Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor limbah	0,24 %	0,40 %	167,00 %
Meningkatnya efektiftas pengelolaan limbah berbahaya dan beracun persampahan	8. Persentase penanganan sampah	49 %	51,15 %	104,39 %
	9. Persentase peningkatan penanganan limbah infeksius menjadi abu	100 %	100 %	100,00 %
	10. Persentase peningkatan pengelolaan limbah B3	75 %	98,64 %	131,52 %
Meningkatnya kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup	11. Persentase Peningkatan Peran Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan dan perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	42 %	42 %	100,00 %
Meningkatnya tata Kelola lingkungan dan penerapan instrument lingkungan	12. Persentase Rekomendasi KLHS yang Diakomodir dalam Perencanaan Daerah	100 %	100 %	100 %
	13. Cakupan Dokumen Lingkungan Hidup yang Dinilai Layak dan Dikeluarkan Rekomendasinya	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	14. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	70 %	59,10 %	84,43 %
	15. Nilai SAKIP OPD	85	70	81,94 %
	16. Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah	97 %	110 %	113,00 %
	17. Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik	98 %	98 %	100,00 %
	18. Persentase Temuan Material	0 %	0 %	100,00 %
Terpenuhinya Dukungan Penyelenggara Urusan Lingkungan Hidup	19. Persentase Keterpenuhan dukungan administrasi perkantoran, prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas aparatur dan pelaporan kinerja dan keuangan	100 %	105,65 %	106,65 %

Pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2022 tersebut dilaksanakan melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan uraian sebagaimana pada tabel berikut ;

Tabel 3 (TC-29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Urusan Kehutanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan Pilihan									
	Bidang Kehutanan									
	Program Pengelolaan Hutan	Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi	61,66 %	65,61 %	61,60 %	71,14 %	115,49	65,47 %	71,14 %	115,49
		Persentase kerusakan kawasan hutan per tahun	16,20 %	0,08 %	16,20 %	0,08 %	0,19 %	14,82 %	0,08 %	0,19 %
		Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan	277.009,86 m^3	134.211,35 m^3	92.336,63 m^3	114.892 m^3	124,41	92.336,63 m^3	114.892 m^3	124,41
		Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu	210.996 ton	18.423,14 ton	3.041,94 ton	7.697,38 ton	253,04	283 ton	6.664,76 ton	253,04
	Kegiatan pengelolaan rencana tata hutan KPH kewenangan provinsi	Luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya	1.780.029 ha	1.780.029 ha	1.780.029 ha	1.780.029 ha	100 %	1.780.029 ha	1.780.029 ha	100 %
	- Sub kegiatan penyusunan rancang bangun tata hutan wilayah KPH	Jumlah dokumen rancang bangun KPH	8 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	- Sub kegiatan pembagian blok/petak pengelolaan hutan KPH	Jumlah patok batas blok dan petak	748 buah	0 buah	748 buah	0 buah	0 %	-	0 buah	0 %
		Jumlah unit kesatuan pengelolaan hutan produksi/lindung yang telah dilakukan pembagian blok	-	-	-	-	-	16 KPH	-	-
	- Sub kegiatan penyediaan pemeliharaan sarana prasarana/ operasionalisasi KPH	Jumlah jenis sarana prasarana operasioanlisasi KPH	3 jenis	0 jenis	3 jenis	0 jenis	0 %	-	0 jenis	0 %
		Jumlah sarana prasarana operasionalisasi resort dan kantor resort kesatuan pengelolaan hutan yang terbangun	-	-	-	-	-	10 unit	-	-
	- Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan hutan	Luas Wilayah yang diusulkan untuk perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	500 ha	0 ha	250 ha	250 ha	100 %	-	250 ha	100 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan untuk wilayah provinsi	-	-	-	-	-	1 dokumen	-	-
	Kegiatan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK)	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan KPH	24 dokumen	0 dokumen	24 dokumen	0 dokumen	0 %	24 dokumen	0 dokumen	0 %
	- Sub kegiatan penyusunan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan	Jumlah dokumen RPHJP Jumlah dokumen RPJHPd	15 dokumen 9 dokumen	0 dokumen 0 dokumen	24 dokumen	0 dokumen	0 %	-	0 dokumen	0 %
		Jumlah dokumen rencana pengelolaan hutan	-	-	-	-	-	24 dokumen	-	-
	Kegiatan Pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung	Jumlah penerimaan dari sektor kehutanan	Rp. 25.000.000		Rp. 25.000.000			Rp. 25.000.000	Rp. 401.304.600	
	- Sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	-	-	-	-	-	4 dokumen	-	-
	- Sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	-	-	-	-	-	10 dokumen	-	-
	- Sub kegiatan Pelayanan Perizinan Usaha/Kerja Sama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani	Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	-	-	-	-	-	10 dokumen	-	-
	- Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi	Luas areal pemanfaatan dan penggunaan kawasan di kawasan hutan produksi	120.425,79 ha	48.639,26 ha	32.897,44 ha	110.426,06 ha	335,67 %		48.639,26 ha	335,67 %
		Jumlah dokumen hasil koordinasi sinkronisasi pembinaan, pengendalian dan pengawasan PBPH di kawasan hutan produksi	180 dokumen	22 dokumen	17 dokumen	41 dokumen	241,18 %	4 dokumen	40 izin	241,18 %
		Jumlah produksi HHBK di kawasan hutan produksi	9.125,82 ton	1.665,95 ton	646,58 ton	646,58 ton	100 %		1.665,95 ton	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	-	-	-	-	-	10 dokumen	-	-
	- Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau Kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan lindung	Jumlah lokasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di kawasan hutan lindung	16 lokasi	9 lokasi	9 lokasi	16 lokasi	177 %	-	16 lokasi	177 %
		Jumlah lokasi produksi HHBK di kawasan hutan lindung	16 lokasi	89 lokasi	9 lokasi	9 lokasi	100 %	-	9 lokasi	100 %
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	-	-	-	-	-	10 dokumen		-
	- Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	-	-	-	-	-	4 dokumen		-
	- Sub kegiatan Pengembangan pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan	Jumlah lokasi pengembangan jasa lingkungan	1 lokasi	1 lokasi	16 lokasi	1 lokasi	6,25 %	2 lokasi	1 lokasi	6,25 %
	Kegiatan pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	Luas rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara	1.571 ha		1.571 ha			1.571 ha	233 ha	
	- Sub kegiatan pengembangan perbenihan untuk rehabilitasi lahan	Jumlah lokasi sumber benih unggul yang dikembangkan	4 lokasi	0 lokasi	10 lokasi	2 lokasi	20,00 %	25.000 btg	2 lokasi	20,00 %
	- Sub kegiatan pembangunan hutan rakyat di luar kawasan hutan negara	Luas pembuatan tanaman hutan rakyat	233 ha	233 ha	450 ha	485 ha	107,78 %	480 ha	485 ha	107,78 %
		Luas pemeliharaan hutan rakyat	233 ha		0 ha				0 ha	
	- Sub kegiatan penyusunan rencana tahunan rehabilitasi lahan (RTnRL)	Jumlah dokumen rencana tahunan rehabilitasi lahan (RTnRHL)	2 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	- Sub kegiatan pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan atau pengawasan rehabilitasi alahan	30 kali	0 kali	30 kali	13 kali	43,33 %	1 laporan	43,33 %	43,33 %
	- Sub kegiatan pembangunan pernghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara	Luas lahan yang dihijaukan lingkungan diluar kawasan hutan negara	10 ha	0 ha	5 ha	4 ha	80 %	60 ha	4 ha	80 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi	Persentase jumlah kasus kerusakan kawasan hutan yang tertangani	100 %		100 %			100 %	100 %	
	- Sub kegiatan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	1.280 orang	180 orang	424 orang	60 orang	14,15 %		240 orang	14,15 %
		Jumlah peserta pelatihan pengendalian kebakaran hutan	30 orang		30 orang				180 orang	
	- Sub kegiatan pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	Luas Kawasan Hutan yang dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	2340 ha	473 ha	1.780.029	549 %	0,03 %	1.780.029 ha	473 kali	0,03 %
		Jumlah papan bicara pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	5 unit/KPH		5 unit/KPH	0 unit/KPH			0 unit/KPH	
	- Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan	288 kali	12 kali	27 kali	51 kali	188,89 %	8 dokumen	51 kali	188,89 %
		Jumlah lokasi pelaksanaan operasi gabungan penanganan tindak pidana khusus kehutanan	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	4 lokasi	400 %		1 lokasi	400 %
	- Sub kegiatan Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/ penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah pelaksanaan koordnasi, sinkronisasi dan monitoring pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan	12 kali	12 kali	6 kali	15 kali	250 %	6 laporan	27 kali	250 %
		Jumlah laporan titik api (hotspot) yang dipantau dan dikendlikan	16 laporan		16 laporan	16 laporan			16 laporan	
	Kegiatan pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu	Jenis HHBK yang diolah pemegang izin	3 jenis		3 jenis			3 jenis		
	- Sub kegiatan pengolahan bahan baku hasil hutan bukan kayu hayati	Jumlah Produksi HHBK yang diolah oleh pemegang izin	49.187,134 ton	0 ton						
	- Sub kegiatan fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin usaha industry primer hasil hutan bukan kayu (IUIPHHBK) melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah komitmen izin fasilitasi penerbitan IUIPHHBK	10 izin	0 izin	5 izin	11 izin	220 %		11 izin	220 %
	- Sub kegiatan pembudidayaan hasil hutan bukan kayu dengan tidak mengurangi fungsi pokoknya	Luas areal budidaya HHBK	100 ha	0 ha	100 ha	0 ha	0 %		0 ha	0 %
	- Sub kegiatan pengawasan perizinan pengolahan hasil hutan bukan kayu	Jumlah pemegang IUIPHHBK yang diawasi	5 izin	5 izin	5 izin	11 izin	220 ha		11 izin	220 ha

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6.000 m3/tahun	Jumlah data dan informasi nilai ekspor hasil hutan	28.155,1717 ton		28.155,1717 ton				39.039,36 m^3	
	- Sub kegiatan rencana pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6.000 m3/tahun	Jumlah industri yang aktif dan tertib aturan	120 industri	42 indutri	42 industri	42 industri	100 %		42 industri	100 %
	- Sub kegiatan Pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6.000 m3/tahun	Jumlah data sebaran GANIS PHPL yang melaksanakan PUHH pada industri	120 orang	70 orang	22 orang	22 orang	100 %		92 orang	100 %
		Jumlah data pemasaran hasil hutan kayu lokal ekspor	72 laporan	24 laporan	3 laporan	3 laporan	100 %		27 laporan	100 %
		Jumlah industri yang dibina dimonitoring dan dievaluasi	150 industri	25 industri	30 industri	24 industri	80 %		49 industri	80 %
	Kegiatan Perbenihan tanaman hutan	Jumlah sertifikasi sumber benih, mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan	95 pemohon		95 pemohon	20 pemohon			20 pemohon	
	- Sub kegiatan penetapan pengadaan benih dan pengedar benih dan atau bibit terdaftar	Jumlah pemohon pengada benih dan pengedar benih/bibit tanaman hutan terdaftar	72 pemohon	0 pemohon	5 pemohon	5 pemohon	100 %		5 pemohon	100 %
		Jumlah calon sumber benih yang diidentifikasi	30 lokasi	0 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	100 %		3 lokasi	100 %
	- Sub kegiatan sertifikasi sumber benih	Jumlah pemohon sertifikasi sumber benih	90 pemohon	18 pemohon	3 pemohon	3 pemohon	100 %		21 pemohon	100 %
	- Sub kegiatan sertifikasi mutu benih	Jumlah pemohon sertifikasi mutu benih	15 pemohon	0 pemohon	0 pemohon	0 pemohon	0 %		0 pemohon	0 %
	- Sub kegiatan sertifikasi mutu bibit	Jumlah pemohon sertifikasi mutu bibit	1000 pemohon	9 pemohon	10 pemohon	10 pemohon	100 %		19 pemohon	100 %
	- Sub kegiatan pengawasan peredaran benih dan/atau bibit	Jumlah lkasi pengawasan peredaran benih dan/atau bibit tanaman hutan	24 kab/kota	15 kab/kota	8 kab/kota	8 kab/kota	100 %		23 kab/kota	100 %
	Program konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya	Jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES untuk kewenangan daerah provinsi yang terdata	2 jenis		2 jenis	2 jenis	100,00 %	2 Jenis	2 jenis	100,00 %
	Kegiatan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES untuk kewenangan provinsi	Jumlah izin penangkar tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	100 penangkar		100 penangkar	18 penangkar			18 penangkar	
	- Sub kegiatan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar	1 laporan	-	1 laporan	1 laporan	100,00 %	1 laporan	1 laporan	100,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES	(TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES								
	Program Pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	Persentase jumlah pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan	16,76 %	20,12	16,25 %	26,84 %	164,92 %	16,76 %	26,84 %	164,92 %
	Kegiatan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya	60 SDM		60 SDM	180 SDM		60 SDM	180 SDM	
	- Sub kegiatan peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh kehutanan dan SDM bidang kehutanan	Jumlah penyuluh kehutanan yang dilakukan peningkatan kapasitas	200 orang	152 orang	100 orang	115 orang	115,00 %	-	115 orang	115,00 %
		Jumlah SDM kehutanan yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya	400 orang	162 orang	200 orang	269 orang	134,50 %	-	269 orang	134,50 %
		Jumlah unit penyelenggara penyuluhan yang dimonitoring dan dievaluasi	16 unit	16 unit	16 unit	20 unit	125,00 %	-	20 unit	125,00 %
	- Sub kegiatan penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan	Jumlah kelompok tani hutan yang mandiri yang mengikuti penguatan dan pendampungan kelembagaan	2 KTH	16 KTH	2 KTH	72 KTH	3600 %	2 KTH	72 KTH	3600 %
		Jumlah pembentukan dan pengembangan wana wiyata widyakarya	1 kelompok	0 kelompok	1 kelompok	3 kelompok	300 %		3 kelompok	300 %
		Jumlah kelompok tani/orang yang mengikuti lomba wana lestari dan kalpataru	7 kelompok	0 kelompok	7 kelompok	3 kelompok	42,86 %		3 kelompok	42,86 %
	- Sub kegiatan penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial	Jumlah peserta sosialisasi/ rapat koordinas perhutanan sosial	100 orang	150 orang	100 orang	150 orang	150,00 %	-	150 orang	150,00 %
		Jumlah kelompok tani yang dikembangkan usaha ekonomi produktifnya	84 kelompok tani/ KTH	0 kelompok	84 kelompok tani/ KTH	84 kelompok tani/ KTH	100,00 %	-	84 kelompok tani/ KTH	100,00 %
		Jumlah kelompok perhutanan sosial yang dimonitoring dan dievaluasi	82 kelompok	120 kelompok	82 kelompok	65 kelompok	79,27 %	-	120 kelompok	79,27 %
		Jumlah peserta temu usaha KUPS	100 orang	65 orang	100 orang	55 orang	55,00 %	-	65 orang	55,00 %
		Jumlah laporan konflik tenurial PS yang difasilitasi penyelesaiannya	2 laporan	2 laporan	2 laporan	1 laporan	50,00 %	-	2 laporan	50,00 %
		Jum;ah produk KUPS yang dipromosikan	10 produk	10 produk	10 produk	10 produk	100,00 %	-	10 produk	100,00 %
		Luas kawasan hutan yang disiapkan perhutanan sosial								

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Jumlah DAS yang direhabilitasi	2 DAS	2 DAS	2 DAS	2 DAS	100 %	2 DAS	2 DAS	100 %
	Kegiatan pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi	Jumlah DAS yang dikelola di provinsi sulawesi selatan	2 DAS	2 DAS	2 DAS	2 DAS	100 %	2 DAS	2 DAS	100 %
	- Sub kegiatan penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang disusun	6 dokumen	-	2 dokumen	-	0,00 %	1 dokumen	-	0,00 %
	- Sub kegiatan optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS	Jumlah DAS yang dioptimalisasi fungsi dan daya dukungnya	2 DAS	-	2 DAS	-	0,00 %	1 dokumen	-	0,00 %
	- Sub kegiatan penerapan Teknik konservasi tanah dan air di wilayah DAS	Jumlah unit dam penahan	34 unit	-	34 unit	83 unit	244,12 %	-	83 unit	244,12 %
		Jumlah unit gully plug	22 unit	-	22 unit	91 unit	413,64 %	-	91 unit	413,64 %
		Jumlah unit sumur resapan	10 unit	-	80 unit	85 unit	106,25 %	-	85 unit	106,25 %
	- Sub kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS	Jumlah masyarakat dan pihak terkait yang hadir dan berpartisipsi pada kegiatan penanaman	250 orang	-	250 orang	250 orang	100,00 %	450 orang	250 orang	100,00 %
	- Sub kegiatan pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS	Jumlah pertemuan atau rapat yang dilaksanakan	4 kali	-	4 kali	4 kali	100,00 %	1 lembaga	4 kali	100,00 %
	- Sub kegiatan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan	1 tahun	-	1 tahun	1 tahun	100,00 %	-	1 tahun	100,00 %
		Jumlah pertemuan atau rapat yang dilaksanakan	4 kali	-	4 kali	4 kali	100,00 %	-	4 kali	100,00 %
	Program Penunjang Urusan pemerintahan daerah provinsi	Persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik	100 %	98,18 %	100 %	92,85 %	92,85 %	100 %	92,85 %	92,85 %
		Persentase penurunan temuan berdasarkan LHP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase realisasi kegiatan perangkat daerah	100 %	95,58 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100 %	100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	- Sub kegiatan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja perangkat daerah	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100 %	2 dokumen	4 dokumen	100 %
	- Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKASKPD Yang tersusun	3 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	3 dokumen	100 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	- Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	2 dokumen	100 %
	- Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang tersusun	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3 dokumen	100 %	1 dokumen	4 dokumen	100 %
	- Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	2 dokumen	100 %
	- Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	2 dokumen	2 dokumen	100 %
	- Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %	2 dokumen	laporan	100 %
	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu	1 dokumen		100 %	100 %		100 %	100 %	
	- Sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji, tunjangan dan TPP	2529 orang	786 orang	820 orang	810 orang	98,78 %	768 orang/ bulan	1596 orang	98,78 %
	- Sub kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akintansi SKPD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	4 dokumen	0 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100 %	1 laporan	2 dokumen	100 %
	- Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	3 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %	1 laporan	2 laporan	100 %
	- Sub kegiatan Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah laporan hasil pemeriksaan (LHP)	3 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %	3 laporan	2 laporan	100 %
	- Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD	Jumlah pelaporan keuangan yang tersusun	54 laporan	18 laporan	11 laporan	18 laporan	163,64 %	14 laporan	36 laporan	163,64 %
	- Sub kegiatan koordinasi pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah pelaporan prognosis yang tersusun	4 laporan	1 laporan	2 laporan	2 laporan	100 %	1 laporan	3 laporan	100 %
	Kegiatan Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah penyusunan dokumen laporan barang milik daerah	2 dokumen					2 dokumen		
	- Sub kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 laporan	0 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %	1 laporan	1 laporan	100 %
	- Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	0 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %		1 laporan	100 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Jumlah Pendapatan Daerah	Rp. 1.712.430.000		1.712.430.000			Rp. 1.712.430.000		
	- Sub kegiatam Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan perencanaan pengelolaan retribusi daerah	2 laporan	0 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %		1 laporan	100 %
	- Sub kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah kebijakan retribusi daerah yang disebarluaskan	2 laporan	0 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %	16 laporan	1 laporan	100 %
	- Sub kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah laporan objek retribusi daerah	2 laporan	0 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %		1 laporan	100 %
	Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai perangkat daerah berdasarkan penilaian kinerja ASN	90 %		90 %	94 %		90 %	94 %	
	- Sub kegiatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang diadakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %	24 dokumen	1 laporan	100 %
	- Sub kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah aparat SKPD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 orang	0 orang	100 orang	0 orang	0 %		0 orang	0 %
	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	- Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	52 jenis	0 jenis	13 jenis	22 jenis	169,23 %	26 paket	22 jenis	169,23 %
	- Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	20 paket	0 paket	1 paket	2 paket	200 %	26 paket	2 paket	200 %
	- Sub kegiatan penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah logistik yang tersedia	6 paket	2 paket	2 paket	4 paket	200 %		6 jenis	200 %
	- Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	20 paket	0 paket	10 paket	20 paket	200 %	26 jenis	20 paket	200 %
	- Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	60 laporan	0 laporan	30 laporan	15 laporan	50 %	13 laporan	15 laporan	50 %
	- Sub kegiatan penyelenggaraan rapat konsultansi dan konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas	3 laporan	1 laporan	1 tahun	1 tahun	100 %	150 laporan	2 laporan	100 %
	- Sub kegiatan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	100 dokumen	0 dokumen	50 dokumen	50 dokumen	100 %	14 dokumen	50 dokumen	100 %
	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	- Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasajasa Surat Menyurat	2 laporan	0 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %	1 laporan	1 laporan	100 %
	- Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %	1 laporan	2 laporan	100 %
	- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	2 tahun	0 tahun	1 tahun	1 tahun	100 %	1 laporan	1 tahun	100 %
	- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1.826 laporan	370 laporan	369 laporan	371 laporan	100,54 %	1 laporan	741 laporan	100,54 %
	Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %					100 %		
	- Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	16 unit	0 unit	8 unit			8 unit		
	- Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	16 unit	0 unit	3 unit	3 unit	100 %	6 unit		100 %
	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	- Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100 %	13 unit	2 unit	100 %
		Jumlah biaya pemeliharaan kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan	3 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100 %		2 unit	100 %
		Jumlah pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan roda 4	3 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100 %		2 unit	100 %
	- Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	129 unit	43 unit	43 unit	53 unit	123,26 %	421 unit	96 unit	123,26 %
		Jumlah biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	129 unit	43 unit	43 unit	23 unit	53,49 %		66 unit	53,49 %
		Jumlah pajak kendaraan dinas atau operasional atau lapangan roda 4	117 unit	18 unit	39 unit	33 unit	84,62 %		51 unit	84,62 %
		Jumlah pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan roda 2	1146 unit	89 unit	120 unit	39 unit	32,50 %		128 unit	32,50 %

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				- Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	20 unit	0 unit	10 unit	3 unit	30 %	100 unit	3 unit	30 %
				- Sub kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	10 unit	0 unit	5 unit	1 unit	20 %	1 unit	1 unit	20 %
				- Sub kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	115 unit	0 unit	25 unit	1 unit	4 % Z	10 unit	1 unit	4 %
				- Sub kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 unit	0 unit	1 unit	1 unit	100 %	18 unit	1 unit	100 %
				- PemeliharaanRehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 unit	0 unit	1 unit	1 unit	100 %	18 unit	1 unit	100 %

Urusan Lingkungan Hidup

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar									
	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup									
	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup									
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	100 %	20 %	60 %	60 %	100 %	100%	60 %	60 %
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen RPPLH yang di tetapkan	1 dokumen	0,50 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	0,50 dokumen	50 %
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah tahapan penetapan RPPLH yang dilaksanakan	3 tahapan	0,50 tahapan	1 tahapan	1 tahapan	100 %	1 tahaoan	1 tahapam	75 %
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DANATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor limbah	5,40 Ton penurunan emisi Co2 eq	3,88 Ton penurunan emisi Co2 eq	4,59 Ton penurunan emisi Co2 eq	7,85 Ton penurunan emisi Co2 eq	171 %	5,40 Ton penurunan emisi Co2 eq	7,85 Ton penurunan emisi Co2 eq	171 %
	Pencegahan Pencemaran danatau Kerusakan Lingkugan Hidup	Jumlah penurunan Emisi GRK	9,929 ton	46,611,25 ton	8,447 ton	5,608 ton	66,39 %	9,929 ton	5,608 ton	66,39 %
	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut	Jumlah sungai, danau, dan pesisir laut dan lokasi udara ambien yang ditetapkan status mutu airnya	29 lokasi	0 lokasi	27 lokasi	28 lokasi	103,70 %	29 lokasi	28 lokasi	103,70 %
	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Lokasi Pelaksanaan Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Ikli	24 kab/kota	24 kab/kota	24 kab/kota	24 kab/kota	100 %	24 kab/kota	24 kab/kota	100 %
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Sampel yang diuji	4.030 sampel	1.153 sampel	1.000 sampel	1.153 sampel	115,30 %	4.030 sampel	1.153 sampel	115,30 %
	Pemulihan Pencemaran danatau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dipulihkan	7 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	100 %	7 lokasi	2 lokasi	100 %
	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Lokasi yang dilaksanakan rehabilitasi	1 lokasi	0 lokasi	1 lokasi	2 lokasi	200 %	1 lokasi	2 lokasi	200 %
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KEHATI	Persentase Tingkat pengelolaan Keanekeragaman Hayati (KeHaTi)	100 %	85,71 %	92,85%	91,42 %	98,46 %	100 %	91,42 %	98,46 %
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah Keanekaragaman Hayati Provinsi yang dikelola	350 jenis	300 jenis	325 jenis	325 jenis	100 %	350 jenis	325 jenis	100 %
	Pengelolaan Kebun Raya	Jumlah Kebun Raya dalam Pengelolaan Taman Keaneka ragaman hayati	1 kebun raya	1 kebun raya	1 kebun raya	1 kebun raya	100 %	1 kebun raya	1 kebun raya	100 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN B3 DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN LIMBAH B3	Cakupan limbah yang dikelola	98 %	16,29 %	97,50 %	98,64%	101,17 %	98 %	98,64%	101,17 %
	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah KabupatenKota dalam satu Daerah Provinsi	Jumlah limbah B3 yang terkelola	4.500.000 ton	589007.56 ton	1.500.000 ton	4.934.631 ton	328,98 %	4.500.000 ton	4.934.631 ton	328,98 %
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah fasilitasi pemenuhan izin pengumpulan limbah B3	200 perusahaan	0 perusahaan	3 perusahaan	3 perusahaan	100 %	200 perusahaan	3 perusahaan	100 %
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan Pemanfaatan Pengolahan danatau Penimbunan	Jumlah limbah B3 yang diolah diincenerator	1.690 ton	419,75 ton	400 ton	328 ton	82 %	1.690 ton	328 ton	82 %
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PPLH	Persentase ketaatan pemrakarsa Usaha Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	26 %	18,46 %	25 %	29,60 %	118,40 %	26 %	29,60 %	118,40 %
	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha dan/atau Kegiatan yang taat terhadap izin Lingkungan izin PPLH dan PUU LHdan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	17 usaha/kegiatan	12 usaha/kegiatan	16 usaha/kegiatan	21 usaha/kegiatan	131,25 %	17 usaha/kegiatan	21 usaha/kegiatan	131,25 %
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan danatau Izin PPLH	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang dinilai	39 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100 %	39 dokumen	7 dokumen	100 %
	Pengawasan Usaha danatau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi Ketaatannya terhadap izin Lingkungan izin PPLH dan PUU LHdan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	65 usaha/kegiatan	75 usaha/kegiatan	65 usaha/kegiatan	71 usaha/kegiatan	109,23 %	65 usaha/kegiatan	71 usaha/kegiatan	109,23 %
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT MHA KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase pengakuan keberadaan MHA , kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	100 %	20,80 %	73,61 %	73,61 %	100 %	100 %	73,61 %	100 %
	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang diverifikasi	19 MHA dan Kearifan Lokal	15 MHA dan Kearifan Lokal	18 MHA dan Kearifan Lokal	18 MHA dan Kearifan Lokal	100 %	19 MHA dan Kearifan Lokal	18 MHA dan Kearifan Lokal	100 %

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Koordinasi Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah kegiatan koordinasi, sikronisasi, penyediaan data dan informasi Pengakuan MHA yang terkait PPLH	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya dalam PPLH	100 %	64,29 %	87 %	87 %	100 %	100 %	87 %	100 %
				Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah lembaga atau kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam PPLH	100 Instansi, Lembaga dan Organisasi	99 Instansi, Lembaga dan Organisasi	134 Instansi, Lembaga dan Organisasi	134 Instansi, Lembaga dan Organisasi	100 %	100 Instansi, Lembaga dan Organisasi	134 Instansi, Lembaga dan Organisasi	100 %
				Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	12 Kegiatan Pendampingan	6 Kegiatan Pendampingan	9 Kegiatan Pendampingan	9 Kegiatan Pendampingan	100 %	12 Kegiatan Pendampingan	9 Kegiatan Pendampingan	100 %
				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Yang di Berikan	100 penghargaan	0 penghargaan	111 penghargaan	111 penghargaan	100 %	100 penghargaan	111 penghargaan	100 %
				Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	5 Rekomendasi	0 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	100 %	5 Rekomendasi	4 Rekomendasi	100 %
				Penilaian Kinerja MasyarakatLembaga MasyarakatDunia UsahaDunia Pendidikan Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	10 penilaian	0 penilaian	8 penilaian	8 penilaian	100 %	10 penilaian	8 penilaian	100 %
				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH Provinsi	Jumlah rekomendasi tindaklanjut kasus/ perkara LH yang ditangani	20 rekomendasi	0 rekomendasi	18 rekomendasi	7 rekomendasi	38,39 %	20 rekomendasi	7 rekomendasi	38,39 %
				Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	20 pengaduan	16 pengaduan	18 pengaduan	18 pengaduan	100%	20 pengaduan	18 pengaduan	100%
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi Penyelesaian Sengketa danatau Penyidikan	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa,	14 kegiatan	10 kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan	100 %	14 kegiatan	12 kegiatan	100 %

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan.								
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah Perkotaan yang tertangani	74 %	82,32 %	73 %	54,48 %	76,43 %	74 %	54,48 %	76,43 %
	Penanganan Sampah di TPATPST Regional	Persentase tahapan Pelaksanaan Pembangunan TPA/TPST Regional	100 %	10 %	75 %	50 %	66.67 %	100 %	50 %	66.67 %
	Penyusunan Rencana Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah rencana, kebijakan dan teknis penanganan sampah yang disusun	2 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	100 %	2 dokumen	2 dokumen	100 %
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPATPST Regional	Jumlah lokasi pengembangan fasilitas teknis pengelolaan sampah	4 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	100 %	4 lokasi	3 lokasi	100 %
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	68,46 %	68,46 %	100 %	68,46 %	68,46 %
		Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	100 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	98 %	98 %	98 %	98 %	100 %	98 %	98 %	100 %
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedia Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan	7 dokumen	0 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100 %	7 dokumen	7 dokumen	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA yang dihasilkan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang dihasilkan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA yang dihasilkan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Dokumen DPA Perubahan yang dihasilkan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang dihasilkan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100 %	12 dokumen	12 dokumen	100 %
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	3 laporam	0 laporam	3 laporam	3 laporam	100 %	3 laporam	3 laporam	100 %
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	100 ASN	100 ASN	100 ASN	103 ASN	100 %	100 ASN	103 ASN	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	3 laporan	3 laporan	5 laporan	3 laporan	60 %	3 laporan	3 laporan	60 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi Umum	100 %	91,17%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	140 unit	130 unit	140 unit	234 unit	167,14%	140 unit	234 unit	167,14%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan dan Peralatan kantor yang diadakan dan dipelihara	30 jenis	25 jenis	30 jenis	25 jenis	83,33 %	30 jenis	25 jenis	83,33 %
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis ATK yang tersedia	100 jenis	23 jenis	20 jenis	23 jenis	115 %	100 jenis	23 jenis	115 %
		Jumlah Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	100 lembar	50.300 lembar	51.000 lembar	50.300 lembar	98,63 %	100 lembar	50.300 lembar	98,63 %
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	135 rapat	0 rapat	45 rapat	48 rapat	106,67 %	135 rapat	48 rapat	106,67 %
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pelayanan Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	PemeliharaanRehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	12 bulan	0 bulan	0 bulan	0 bulan	0 %	12 bulan	0 bulan	0 %

Berdasarkan evaluasi rencana kerja perangkat daerah tahun 2022, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Urusan Kehutanan tahun 2022

1. Program Pengelolaan Hutan

   Adapun indikator program pengelolaan hutan sebagai berikut :

   a. Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi
   b. Persentase kerusakan hutan per tahun
   c. Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan
   d. Jumlah produksi hasil htan bukan kayu

   Pencapaian indikator Program Pengelolaan Hutan diuraikan sebagai berikut:

   a. Cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi

      Luas lahan kritis di Sulawesi Selatan masih terdapat ± 402.430 ha dengan tingkat kekritisan sangat kritis dan dan kritis baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan menjadi kewenangan provinsi sebagaimana di atur pada UU No. 23 tahun 2014, namun pelaksanaan rehabilitasi lahan tersebut sangat ditentukan partisipatif masyarakat karena sasaran lokasi berada pada tanah milik masyarakat yang bersifat privat, sehingga diperlukan singeritas dan dukungan masyarakat dan pemerintah.

      Indikator cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi merupakan salah satu upaya pembentuk tutupan lahan bervegetasi pohon dan akan menjadi faktor pembentuk indeks kualitas tutupan lahan. Luas rehabilitasi hutan dan lahan pada tahun 2022 mencapai 2.613,20 ha terdiri atas 720,2 ha di luar kawasan hutan dan di dalam kawasan hutan seluas 13.003 ha. Adapun realisasi cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi tahun 2022 sebesar 71,14 % atau melebihi dari target sebesar 61,60 %.

   b. Persentase kerusakan hutan per tahun

      Kerusakan hutan masih menjadi perhatian dan fokus pemerintah untuk menurunkan atau meminimalisasi tingkat kerusakannya. Kerusakan hutan di Sulawesi selatan masih disebabkan oleh kebakaran hutan dan perambahan hutan. kerusakan hutan akan

mempengaruhi fungsi dan kawasan hutan baik secara fisik maupun kimia tanah sehingga berdampak pada produktifitas hutan. Kerusakan kawasan hutan tahun 2022 yang diakibatkan oleh kebakaran hutan seluas 55,85 ha, perambahan hutan seluas 471,94 ha dan pertambangan tanpa izin seluas 0,0003 ha, perladangan berpindah seluas 53,00 ha. Realisasi indikator persentase kerusakan hutan pertahun sebesar 0,03 % atau melebihi target dari target 16,20 %.

c. Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan

   Produksi hasil hutan kayu olahan merupakan penyokong PDRB sektor kehutanan. Realisasi produksi kayu olahan sebesar 114.891,14 m^3 dari target 92.336,62 m^3. Dengan demikian indikator jumlah produksi hasil hutan kayu melebihi target pada tahun 2022

d. Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu

   Produksi hasil hutan bukan kayu juga penyokong PDRB sektor kehutanan. Realisasi produksi hasil hutan bukan kayu sebesar 8.102,81 ton m^3 dari target 283 ton. Dengan demikian indikator jumlah produksi hasil hutan kayu melebihi target pada tahun 2022

2. Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya :

   Program Konservasi Su,berdaya Alam dan Ekosistemnya mendukung pencapaian sasaran kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu:

   a. Persentase jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau satwa liar yang tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES kewenangan provinsi yang terdata

   Adapun indikator Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya adalah jumlah tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau satwa liar yang tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES kewenangan provinsi yang terdata, dengan realisasi pencapaian sebesar 2 jenis dari target 2 jenis atau mencapai target

   Capaian program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya yang mencapai target dipengaruhi karena:

   a. Melakukan identifikasi jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau satwa liar yang tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES kewenangan provinsi

b. Sosialisasi jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau satwa liar yang tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES

3. Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan

Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan mendukung pencapaian sasaran kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Persentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan didalam dan disekitar kawasan hutan dalam rangka pemberdayaan responsive gender melalui pemberian peluang kerja dan kesempatan berusaha yang berbasis pelestarian sumber daya hutan.

Perhutanan sosial merupakan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan dan menjadi progam nasional dengan memberikan akses pengelolaan kawasan hutan kepada masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam jangka waktu tertentu dengan azas kelestarian dan keberlanjutan hutan. Akses pengelolaan hutan tersebut terdiri dari hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan.

Indikator program Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan yaitu persentase jumlah pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan.

Capaian program ini tahun 2022 mencapai 196.745,33 Ha dengan pemegang izin perhutanan sosial sebanyak 505 kelompok, atau sebesar 26,80 % dari target 16,25 %. Dengan demikian capaian program ini melebihi target pada tahun 2022.

Capaian kinerja program perhutanan sosial melebihi target dipengaruhi oleh:

a. Adanya kelompok kerja percepatan perhutanan sosial di Provinsi Sulawesi Selatan dengan tugas menyusun roadmap perhutanan sosial,

koordinasi dan sosialisasi, fasilitasi dan pendampingan, fasilitasi pengembangan usaha, pengendalian, monitoring dan evaluasi perhutanan sosial, fasilitasi pembentukan kelompok kerja percepatan perhutanan sosial kabupaten/kota, diseminasi dan informasi perhutanan sosial, fasilitasi dan mediasi konflik tenurial perhutanan sosial. Kelompok kerja perhutanan sosial terdiri atas pemerintah pusat (BPSKL), pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, lembaga pendidikan tinggi (Universitas Hasanuddin dan Universitas Muhammadiyah), media, yayasan, LSM, Organisasi non Pemerintah

b. Keterlibatan penyuluh dan pendamping perhutanan sosial mulai penyiapan perhutanan sosial, pendampingan kelola kelembagaan, pendampingan kelola usaha, pendampingan kelola kawasan kelompok tani.
c. Fasilitasi alat usaha ekonomi produktif kepada kelompok tani hutan sebagai upaya pertambahan nilai ekonomi usaha kelompok.

4. Program pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

   Program pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) mendukung pencapaian sasaran rehablitasi hutan dan lahan dengan indikator indeks kualitas tutupan lahan.

   Adapun indikator kinerja program Daerah Aliran Sungai (DAS) adaah jumlah DAS yang direhabilitasi.

   Capaian program Daerah Aliran Sungai tahun 2022 mencapai 100 % atau jumlah DAS yang direhabilitasi sebanyak 2 DAS dari target 2 DAS. Capaian program ini melalui penerapan teknik koservasi melalui pembuatan bangunan konservasi berupa dam penahan dan gully plug, pelibatan kelembagan forum DAS dalam menyusun rencana pengelolaan DAS.

Pencapaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 memberi kontribusi terhadap pembangunan daerah Sulawesi Selatan diantaranya :

1. Kontribusi ekonomi terhadap PDRB Sulawesi Selatan.

   Kontribusi kehutanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan tergabung pada PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Kontribus PDRB

berdasarkan sektor lapangan usaha Sulawesi Selatan pada tahun 2022 memberi kontribusi sebesar 0,05 %

Kontribusi kehutanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan berdasarkan lapangan usaha memberi kontribusi pada tahun 2018 sebesar 0,06 % dengan nilai PDRB sebesar 289.321,7 milyar, pada tahun 2019 sebesar 0,06 % dengan nilai PDRB sebesar Rp. 306.553,3 milyar. Pada tahun 2020 sebesar 0,07 % dengan nilai PDRB sebesar Rp. 335.490,00 milyar. Pada tahun 2021 sebesar 0,06 % dengan nilai PDRB sebesar Rp. 315.240 milyar, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 0,05 % dengan nilai PDRB sebesar Rp. 327.473 milyar. Dengan demikian nilai PDRB sektor kehutanan terus mengalami pertumbuhan dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Pertumbuhan nilai PDRB tahun 2018-2022 mencapai 13,18 %. Kontribusi kehutanan tersebut berasal dari produksi hasil hutan kayu olahan dan produksi hasil hutan bukan kayu, dan belum menghitung nilai pemanfaatan jasa lingkungan/ekowisata.

2. Rehabilitasi hutan dan lahan

   Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya perbaikan daya dukung lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Rehabilitasi hutan dan lahan memberi kontribusi terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Salah satu unsur IKLH adalah Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang menjadi sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Nilai IKTL provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 sebesar 54,94, tahun 2019 seberar 58,06, tahun 2020 sebesar 55,10, tahun 2021 sebesar 55,40 dan tahun 2022 sebesar 55.46.

3. Kerusakan kawasan hutan

   Pengendalian kerusakan kawasan hutan dan lahan adalah upaya perlindungan daya tampung lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Perlindungan kawasan hutan dari kerusakan yang disebabkan kebakaran hutan, perambahan hutan, illegal logging.

4. Pemberdayaan masyarakat sekita hutan

   Masyarakat sekitar hutan masih bergantung pada potensi hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Berbagai jenis usaha kelola kawasan memungkinkan dikembangkan seperti pengolahan aren, kopi, dan madu.

Masyarakat sekitar hutan tergabung secara berkelompok dengan membuat kelompok tani hutan dalam menjalankan kelola usaha dan kelola kawasan secara legal melalui perhutanan sosial. Perkembangan izin perhutanan sosial terus mengalami peningkatan, dan ini menunujukkan bahwa perhutanan sosial masih diminati masyarakat sekitar hutan karena memberikan akses legal dalam mengelola hutan tanpa ada kekhawatiran lagi.

Izin pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial pada tahun 2018 seluas 52.529,22 ha, tahun 2019 seluas 80.425,79 ha, tahun 2020 seluas 161.133,22 ha, tahun 2021 seluas 175.802,42 ha, dan tahun 2022 seluas 196.745,33 Ha

Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2022

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

   Untuk mewujudkan pelaksanaan Program ini dialokasikan anggaran yang diarahkan untuk Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi.

   Pelaksanaan penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi adalah sebagai berikut :

   - Sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi pada Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan outcome jumlah tahapan penetapan RPPLH yang dilaksanakan yaitu target 1 tahapan telah tercapai dan berhasil diselesaikan dengan baik.
   - Tahapan Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi yang dilaksanakan tahun 2022 adalah penyusunan materi teknis berupa dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi.
   - Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Sulawesi Selatan melibatkan Tim Kelompok Kerja yang terdiri dari OPD yang terkait dan didampingi oleh Tenaga Ahli/Pakar dari perguruan tinggi.
   - Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Sulawesi Selatan telah diverifikasi di Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Pengendalian Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor.

2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

   Melalui program ini dilaksanakan kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

   - Sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut indikator capaian sub jumlah sungai, danau, dan pesisir laut dan lokasi udara ambien yang ditetapkan status mutu airnya dengan target 27 lokasi dan realisasi 28 lokasi.
   - Sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim indikator capaian sub jumlah lokasi pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan target 24 kab/kota dan realisasi 24 kab/kota
   - Sub kegiatan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup provinsi indikator capaian sub jumlah sampel yang diuji dengan 1000 sampel dan realisasi 1153 sampel
   - Sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi indikator capaian sub jumlah jumlah lokasi yang dilaksanakan rehabilitasi dengan target 2 lokasi dan realisasi 2 lokasi

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

   Untuk mewujudkan pelaksanaan program diarahkan pada Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati. Pengelolaan Kebun Raya Pucak Berdasarkan asas : kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keanekaragaman hayati, keterbukaan dan partisipatif. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan di Kebun Raya Pucak kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros.

   Kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati provinsi indikator capaian jumlah keanekaragaman hayati provinsi yang dikelola dengan target 325 jenis dan realisasi 325 jenis.

   Sub kegiatan pengelolaan kebun raya indikator capaian sub jumlah kebun raya dalam pengelolaan taman keaneka ragaman hayati dengan target 1 kebun raya dan realisasi 1 kebun raya.

4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

   Program ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh B3 dan limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai dengan fungsinya kembali. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3) dengan indikator capaian program cakupan limbah yang dikelola target 97,50% dan realisasi 98,85 %.

   Capaian program didukung melalui kegiatan pengumpulan limbah b3 lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi indikator capaian jumlah limbah b3 yang terkelola dengan target 4.000.000 ton dan realisasi 5.557.493,578 ton.

   - Sub kegiatan fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3 dilaksanakan indikator capaian sub jumlah fasilitasi pemenuhan izin pengumpulan limbah B3 dengan target 3 perusahaan dan realisasi 3 perusahaan.
   - Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah pusat dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan indikator capaian sub jumlah limbah B3 yang diolah diincenerator dengan target 400 ton perusahaan dan realisasi 400 ton.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

   Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dengan indikator capaian program persentase ketaatan pemrakarsa usaha terhadap izin lingkungan dan izin pplh target 25% dan realisasi 29,6 %.

   Program ini ditunjang melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi indikator capaian jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan izin PPLH dan PUU LH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dengan target 16 usaha/kegiatan dan realisasi 21 kegiatan/usaha. Adapun sub kegiatannya yaitu :

- Sub kegiatan fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin indikator capaian sub jumlah dokumen lingkungan hidup yang dinilai target 7 dokumen dan realisasi 7 dokumen
- Sub kegiatan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi indikator capaian sub jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan izin PPLH dan Puu Lh dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dengan target 65 usaha/kegiatan perusahaan dan realisasi71 usaha/kegiatan

6. Program Pengelolaan Persampahan

   Pembinaan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, baik dari segi kebijakan teknis maupun pembinaan terhadap sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang ada di kab/kota dengan mengarahkan pada meningkatnya efektivitas pengelolaan timbulan sampah dengan melaksankan koordinasi dan pembinaan kab/kota, mendorong keterlibatan masyarakat dan kab/kota dalam rangka mengefektifkan pengelolaan timbulan sampah untuk menjaga kualitas lingkungan.

   Program pengelolaan persampahan dengan indikator capaian persentase sampah perkotaan yang tertangani dengan target 73 % penghargaan dan realisasi 54.48 %. didukung melalui kegiatan penanganan sampah di TPA/TPST regional dengan indikator capaian persentase tahapan pelaksanaan pembangunan TPA/TPST regional dengan target 75% realisasi 50 %.

7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH

   Program pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan pplh dengan indikator capaian program persentase pengakuan keberadaan MHA , kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH dengan target 73.61 %dan realisasi 73.61 %.

   Program ini didukung melalui kegiatan pengakuan MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH indikator capaian jumlah MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan

tradisional yang diverifikasi target 18 MHA dan kearifan lokal dan realisasi 18 MHA dan kearifan lokal

8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

   Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat dengan indikator capaian cakupan lembaga atau kelompok masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya dalam pplh target 87 % dan realisasi 87 %. didukung melalui kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah provinsi indikator capaian jumlah lembaga atau kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pplh dengan target 134 instansi, lembaga dan organisasi dan 134 instansi, lembaga dan organisasi.

9. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat

   Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat dengan indikator capaian jumlah penghargaan lingkungan hidup yang di berikan target 111 penghargaan dan realisasi 111 penghargaan. didukung melalui kegiatan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah provinsi indikator capaian jumlah rekomendasi pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah dengan target 4 rekomendasi realisasi 4 rekomendasi.

10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

    Program penanganan pengaduan lingkungan hidup dengan indikator capaian cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti target 100 % penghargaan dan realisasi 100 %.

    Capaian program ini didukung melalui kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh) provinsi indikator capaian jumlah rekomendasi tindaklanjut kasus/ perkara lh yang ditangani dengan target 18 rekomendasi realisasi 18 rekomendasi.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun indikator kinerja kunci outcome ;

Tabel 4 (Tabel TC_30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Urusan Kehutanan											
1	Persentase peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial		%	15,65	16,25	16,76	27	20,12	26,80	16,76	27	
2	Persentase kerusakan hutan per tahun (deforestasi)		%	17,59	16,20	14,82	0,02	0,08	0,03	14,82	0,029	
3	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi		%	57,91	61,60	65,47	72,00	65,61	71,14	65,47	72,00	
4	Kontribusi kehutanan terhadap PDRB		%	0,06	0,07	0,08	0,05	0,06	0,05	0,08	0,05	
5	Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan		%	75,66	75,66	75,66	75,66	75,66	75,66	75,66	75,66	
	Urusan Lingkungan Hidup											
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		Poin	72,25	72,63	72,84	73,57	73,23	74,17	72,84	73,57	
2	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		%			73,84	60	80	61,97	73,84	60	

Pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) outcome sesuai tabel diatas diuraikan sebagai berikut :

1. Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial

   Perhutanan sosial menjadi suatu solusi dan tantangan pembangunan sektor kehutanan. Keadaan ini menjadi perhatian bagi pemerintah dan stakeholder lainnya. Perhutanan sosial menjadi solusi karena masyarakat dan lembaga desa diberi akses legal pengelolaan hutan dalam jangka waktu tertentu. Dengan akses legal tersebut masyarakat dapan mengelola kawasan hutan dengan mempertimbangkan potensi hutan tersebut, dengan harapan mampu mendorong perekonomoan mikro bagi masyarakat.

   Pencapaian pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial sampai dengan tahun 2022 mencapai 196.745,33 ha atau 11,05 % dari luas hutan lindung dan hutan produksi seluas 1.780.029 ha.

   Perkembangan perhutanan sosial dapat dilihat pada diagram berikut :

   Diagram 1

   Perkembangan perhutanan sosial 2022

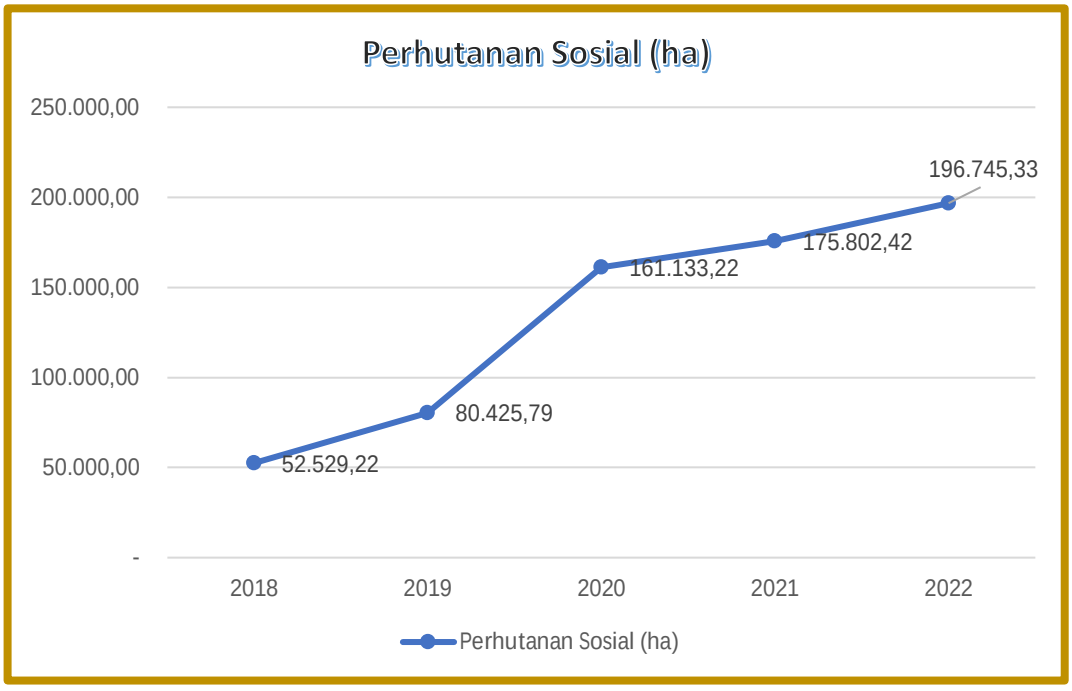

   Akses legal pengelolaan hutan dilaksanakan dalam bentuk skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan

Kulin KK, yang dikelola oleh kelompok tani hutan berjumlah 505 kelompok tani atau 19,75 % dari total usulan KTH yang terintegrasi.

Diagram 2

Kelompok Tani Hutan Tahun 2022

Perkembangan pengelolaan hutan berbasis pemberdayaan masyarakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini memberi gambaran bahwa animo masyarakat untuk mengelola hutan semakin besar yang tentunya diperlukan pembinaan dan pengendalian, serta peningkatan usaha masyarakat sehingga dapat memberi dampak peningkatan ekonomi masyarakat. Melalui perhutanan sosial menjadi salah satu solusi penyelesaian sengketa tenurial lahan hutan yang selama ini menjadi persoalan pembangunan kehutanan.

Berdasarkan Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) Revisi VII, dengan target perhutanan sosial di Provinsi Sulawesi Selatan seluas 272.858,95 Ha, maka persentase capaian luasan perhutanan sosial sebesar 72,10 % dari target yang ditetapkan.

2. Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi).

   Kerusakan hutan di Provinsi Sulawesi Selatan masih menjadi tantangan pembangunan kehutanan. Aktivitas masyarakat sekitar hutan menjadi potensi terjadinya kerusakan hutan, sebagian besar masyarakat memanfaatkan hutan sebagai lahan budidaya tanaman semusim yang

memiliki masa panen singkat. Upaya perlindungan dan pengamanan hutan dari kerusakan hutan terus dilakukan dengan pendekatan persuasif sehingga diharapkan adanya kesadaraan untuk menjaga ekosistem hutan yang ada.

Kejadian kerusakan hutan disebabkan pengolahan hutan tanpa izin (perambahan hutan), kebakaran hutan dan illegal logging. Perkembangan kerusakan hutan disajikan pada diagram berikut :

Diagram 3

Kerusakan Kawasan Hutan

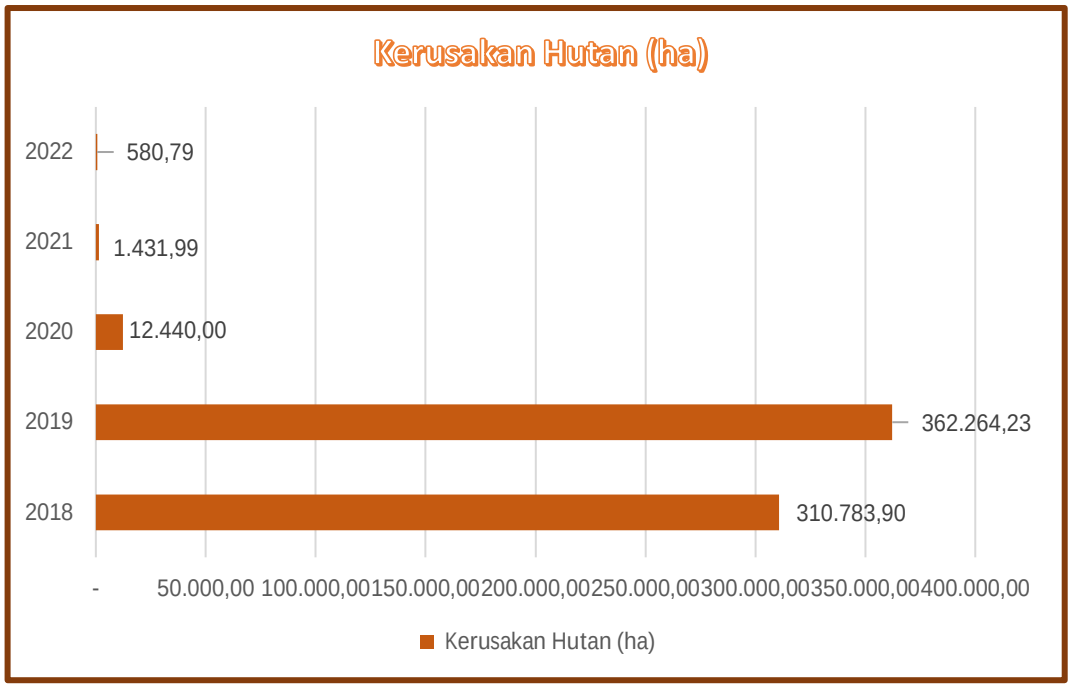

Berdasarkan diagram diatas menunjukkan bahwa, kerusakan hutan mengalami penurunan menjadi 1.4320 ha. Penurunan ini disebabkan karena tahun 2019 luas lahan kritis masih menjadi bagian penghitungan kerusakan hutan, yang semestinya menjadi bagian penghitungan luas lahan kritis yang direhabilitasi.

3. Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi

Lahan kritis menjadi prioritas pembangunan kehutanan, dengan luas lahan kritis mencapai 389.427,00 ha pada tahun 2022. Salah satu strategi penanganan lahan kritis melalui pelibatan semua stakeholder untuk melakukan penanaman. Perkembangan rehabilitasi hutan dan lahan disajikan sebagai berikut :

Diagram 4

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

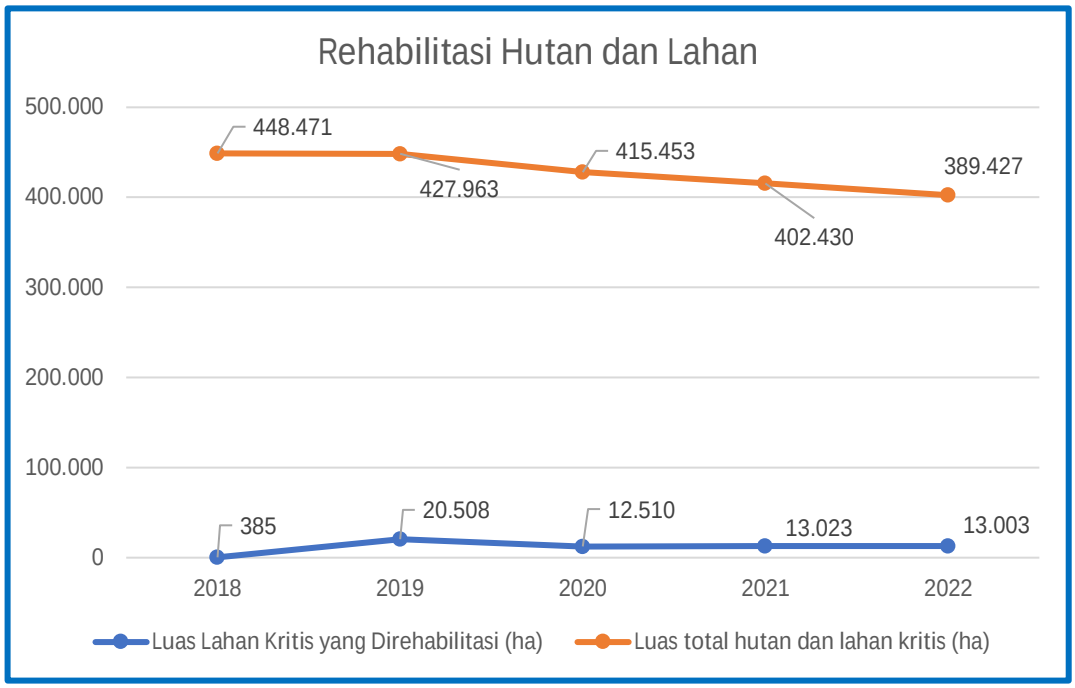

4. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

Hutan memiliki nilai ekonomi yang sangat besar, tetapi hanya sebagian kecil dari sumber daya hutan yang berkontribusi secara riil terhadap penerimaan negara dan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari pencapaian Konribusi Sektor kehutanan terhadap PDRB provinsi Sulawesi Selatan dari tahun ketahun mengalami penurunan, dimana capaian pada tahun 2018 sebesar 0,06 persen, tahun 2019 tetap 0,06 persen, pada tahun 2020 sebesar 0,06 dan tahun 2021 triwlual III sebesar 0,6 %. Secara persentase menunjukkan kecilnya kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan, namun secara nilai terus mengalami pertambahan dari tahun ke tahun.

Kontribusi kehutanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan berdasarkan lapangan usaha memberi kontribusi sebesar 0,06 % pada tahun 2018 dengan nilai PDRB sebesar 289.321,7 milyar dan pada tahun 2019 sebesar 0,06 % dengan nilai PDRB sebesar Rp. 306.553,3 milyar. Pada tahun 2020 sebesar 0,06 % dengan nilai PDRB sebesar Rp. 328.192,82 milyar. Pada tahun 2021 triwulan III sebesar 0,06 % dengan nilai PDRB sebesar Rp. 315.240 milyar Kontribusi kehutanan tersebut berasal dari

produksi hasil hutan kayu olahan dan produksi hasil hutan bukan kayu, dan belum menghitung nilai pemanfaatan jasa lingkungan/ekowisata.

Diagram 5

Kontribusi PDRB sektor kehutanan terhadap PDRB Sulsel

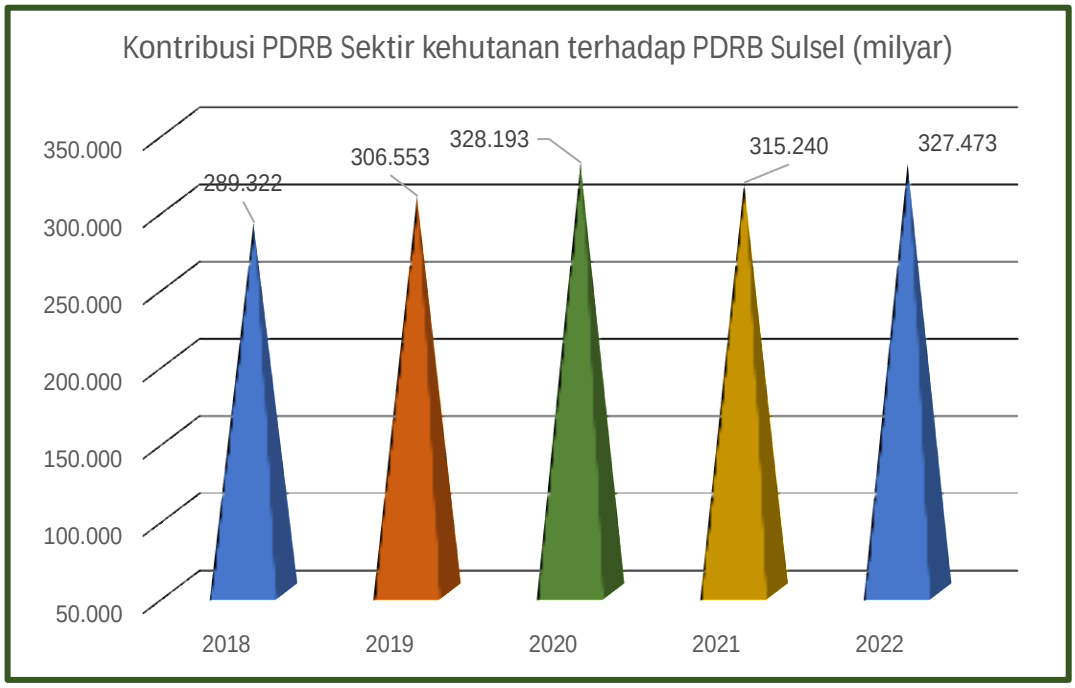

5. Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan

Bila melihat rasio luas kawasan lindung terhadap total Luas Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2015 sampai tahun 2019, menunjukkan bahwa rasio luas kawasan lindung terhadap luas kawasan hutan di Sulawesi Selatan pada periode sebelumnya (2015-2018) sebesar 76,45 persen menurun menjadi 75,66 persen pada tahun 2020.

Diagram 6

Rasio Luas Kawasan Lindung terhadap Toral Luas Kawasan Hutan

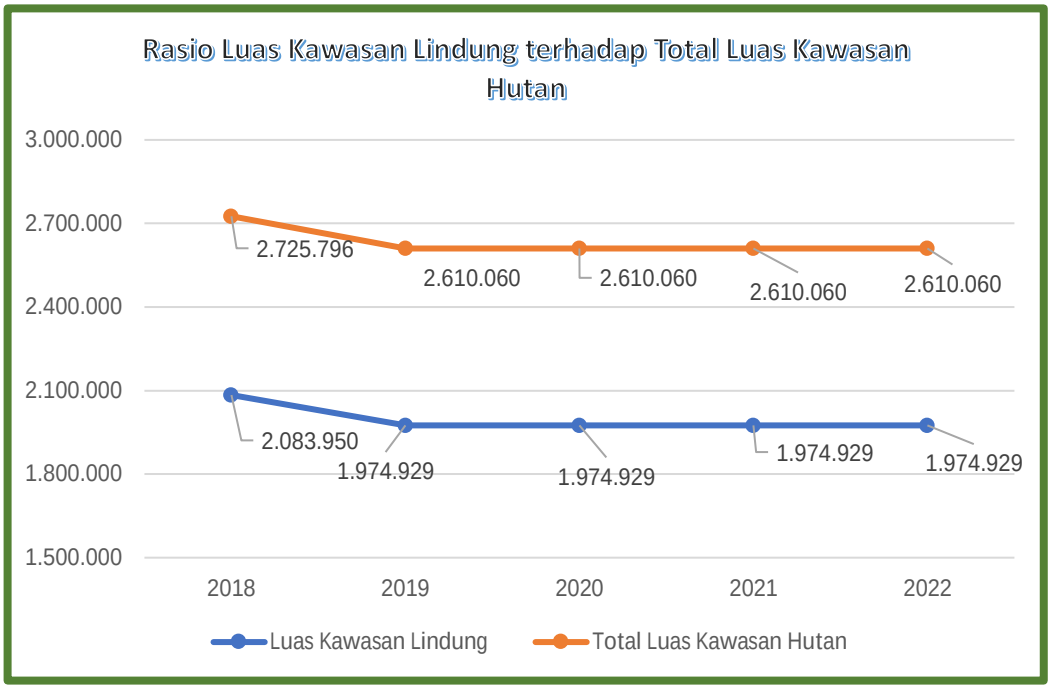

Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan tahun 2020 mencapai 75,66 %, merupakan luas rasio luas kawasan hutan lindung dan Kawasan pelestarian alam (hutan suaka alam, cagar alam) terhadap luas Kawasan hutan Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 362/MenLHK/setjen/PLA.0/5/2019 bahwa luas kawasan hutan di provinsi Sulawesi Selatan seluas 2.610.060 ha, tersaji pada diagram berikut :

Diagram 7

Luas Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan

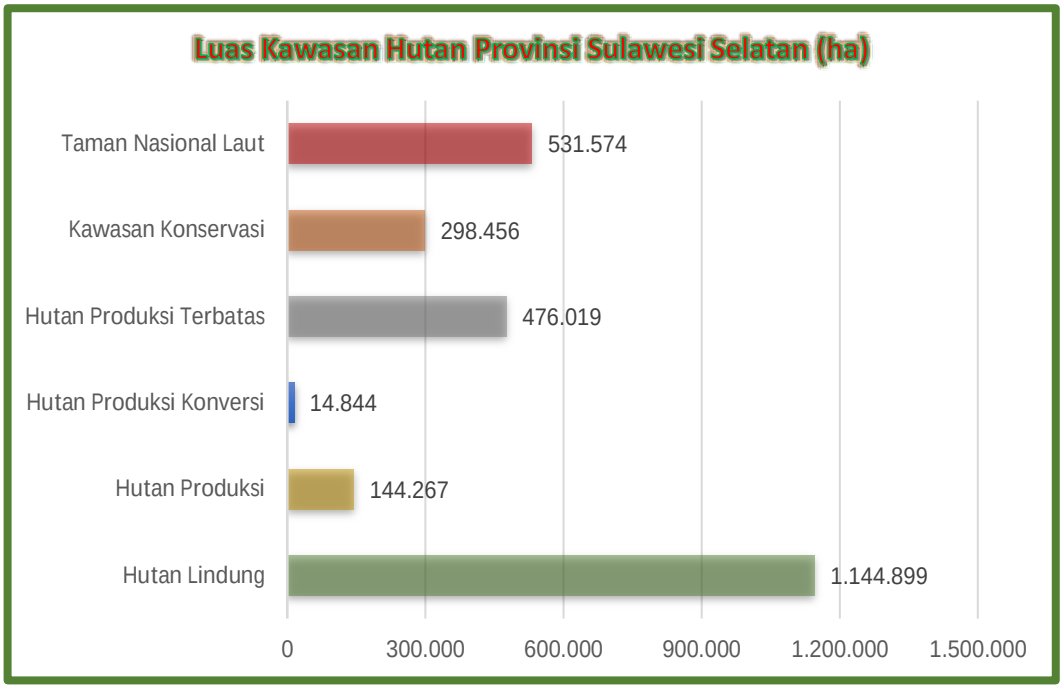

6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks kualitas lingkungan hidup merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengukuran kualitas lingkungan secara umum dilakukan secara parsial berdasarkan media, yaitu air, udara, dan lahan. Capaian indeks kualitas lingkungan hidup dapat dilihat pada diagram berikut :

Diagram 8

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan

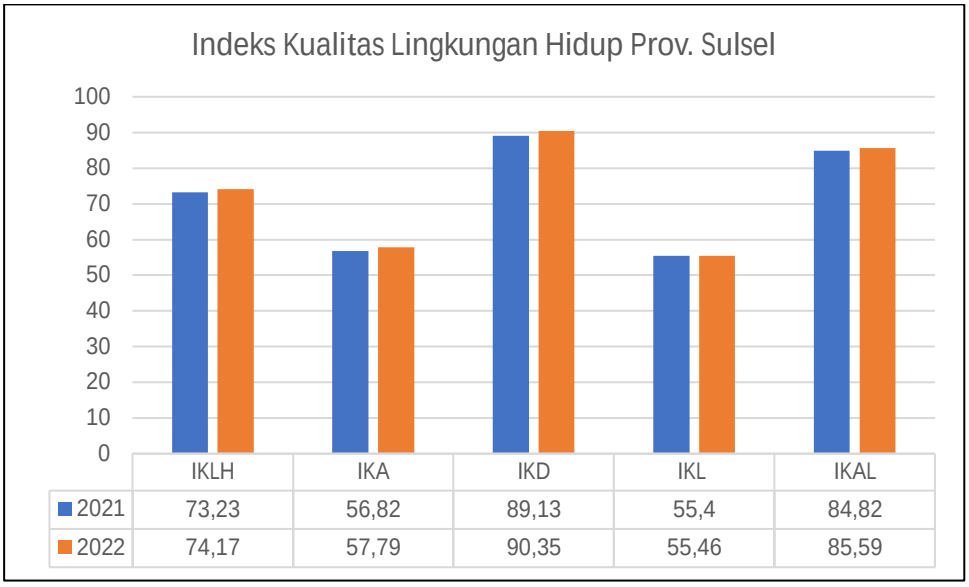

	IKLH	IKA	IKD	IKL	IKAL
2021	73,23	56,82	89,13	55,4	84,82
2022	74,17	57,79	90,35	55,46	85,59

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

Isu penyelenggaran tugas dan fungsi perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan antara lain :

1. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan lindung dan hutan produksi.

   Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan lindung diperuntukkan untuk hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan akan memberi dampak pada ekonomi daerah namun harus tetap memperhatikan asas kelestarian dan keberlanjutan. Potensi kawasan hutan cukup beragam mulai pengembangan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan/ekowisata, namun belum dimanfaatkan secara optimal karena membutuhkan dukungan berbagai pihak.

2. Adanya kerusakan wilayah DAS

   Di provinsi Sulawesi Selatan terdapat DAS lintas provinsi, DAS lintas kabupaten, dan DAS dalam Kabupaten. Kondisinya terdapat DAS yang perlu dipertahankan dan DAS yang perlu dipulihkan. Salah satu DAS lintas provinsi yang memerlukan pemulihan yaitu DAS Saddang dan salah satu DAS lintas kabupaten yang perlu dipulihkan yaitu DAS Jeneberang seluas 78.883,90 ha.

3. Masih adanya kasus illegal logging, kebakaran hutan, perladangan berpindah
4. Masih rendahnya daya saing (kualitas dan kuantitas) produk kehutanan yang dihasilkan oleh kelompok tani hutan
5. Penanganan sampah dan perbaikan kualitas udara perkotaan
6. Peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik serta proses industri bersih dan ramah lingkungan
7. Pengurangan produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang dan penggunaan kembali,

Permasalahan yang masih menjadi tantangan di sektor lingkungan hidup dan kehutanan antara lain:

1. Belum optimalnya upaya pengelolaan hutan berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Masih terdapatnya konflik kepemilikan dan pemanfaatan kawasan hutan yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pembangunan;
3. Masih terdapatnya lahan kritis dan belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis;
4. Pemanfaatan potensi sumber daya hutan belum optimal, utamanya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
5. Pencemaran lingkungan dengan meningkatnya beban pencemaran pada Daerah Aliran Sungai dan emisi ke udara ambient
6. Penegakan hukum dan regulasi lingkungan hidup, dengan masih banyaknya pengaturan hukum dan regulasi pengelolaan lingkungan hidup yang belum konsisten teraplikasikan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 dengan memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif perangkat daerah. maka kebutuhan rencana kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5 (TC-31)

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**		**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup**	**66,67 %**	**307.517.300,00**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**		**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup**	**66,67 %**	**307.517.300,00**	
2.11.02.1.01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi**		**Persentase Pemenuhan Dokumen Telaah RPPLH**	**60 %**	**49.998.800,00**	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi**		**Persentase Pemenuhan Dokumen Telaah RPPLH**	**60 %**	**49.998.800,00**	
2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	3 Dokumen	49.998.800,00	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	3 Dokumen	49.998.800,00	
2.11.02.1.02	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**		**Persentase pemenuhan dokumen KLHS yang dibuat dan dilaksanakan**	**100 %**	**257.518.500,00**	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**		**Persentase pemenuhan dokumen KLHS yang dibuat dan dilaksanakan**	**100 %**	**257.518.500,00**	
2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	257.518.500,00	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	257.518.500,00	
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**		**Potensi emisi GRK dari sektor limbah**	**15257.36 TonCO2e**	**703.619.800,00**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**		**Potensi emisi GRK dari sektor limbah**	**15257.36 TonCO2e**	**703.619.800,00**	
2.11.03.1.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**	Gowa, Takalar, Jeneponto, Bulukumba, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Pangkep, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur, Parepare	**Jumlah lokasi pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan LH**	**24 kabupaten/kota**	**703.619.800,00**	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**	Gowa, Takalar, Jeneponto, Bulukumba, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Pangkep, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur, Parepare	**Jumlah lokasi pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan LH**	**24 kabupaten/kota**	**703.619.800,00**	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 Dokumen	175.004.800,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 Dokumen	175.004.800,00	
2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen	58.930.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen	58.930.000,00	
2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi		Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1.200 Dokumen	469.685.000,00	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi		Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1.200 Dokumen	469.685.000,00	
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**		**Persentase Tingkat pengelolaan Keanekeragaman Hayati (KeHaTi)**	**88,24 %**	**567.964.884,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**		**Persentase Tingkat pengelolaan Keanekeragaman Hayati (KeHaTi)**	**88,24 %**	**567.964.884,00**	
2.11.04.1.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi**	**Desa Tompobulu, Kec Tompobulu, Kab Gowa**	**Jumlah Keanekaragaman Hayati Provinsi yang dikelola**	**375 Jenis**	**567.964.884,00**	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi**	**Desa Tompobulu, Kec Tompobulu, Kab Gowa**	**Jumlah Keanekaragaman Hayati Provinsi yang dikelola**	**375 Jenis**	**567.964.884,00**	
2.11.04.1.01.0003	Pengelolaan Kebun Raya	Maros, Kec. Tompobulu	Luas Kebun Raya yang Dikelola lingkup Kewenangan Provinsi	27 Ha	567.964.884,00	Pengelolaan Kebun Raya	Maros, Kec. Tompobulu	Luas Kebun Raya yang Dikelola lingkup Kewenangan Provinsi	27 Ha	567.964.884,00	
2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**		**Persentase limbah yang dikelola**	**98,65 %**	**4.700.000.000,00**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**		**Persentase limbah yang dikelola**	**98,65 %**	**4.700.000.000,00**	
2.11.05.1.01	**Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Makassar, Sulawesi Selatan**	**Jumlah limbah B3 yang terkelola berdasarkan neraca LB3**	**2.200.000 Ton**	**4.700.000.000,00**	**Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Makassar, Sulawesi Selatan**	**Jumlah limbah B3 yang terkelola berdasarkan neraca LB3**	**2.200.000 Ton**	**4.700.000.000,00**	
2.11.05.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3 Dokumen	100.000.000,00	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3 Dokumen	100.000.000,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	250 Dokumen	4.600.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	250 Dokumen	4.600.000.000,00	
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**		**Persentase tingkat ketaatan pemarakarsa Usaha Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH**	**40 %**	**215.002.700,00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**		**Persentase tingkat ketaatan pemarakarsa Usaha Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH**	**40 %**	**215.002.700,00**	
2.11.06.1.01	**Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	**Makassar, Sulawesi Selatan**	**Jumlah usaha dan/atau Kegiatan yang taat terhadap izin Lingkungan izin PPLH dan PUU LHdan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	**60 Usaha/Kegiatan**	**215.002.700,00**	**Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	**Makassar, Sulawesi Selatan**	**Jumlah usaha dan/atau Kegiatan yang taat terhadap izin Lingkungan izin PPLH dan PUU LHdan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	**60 Usaha/Kegiatan**	**215.002.700,00**	
2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	10 Dokumen	50.002.700,00	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	10 Dokumen	50.002.700,00	
2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	150 Badan Usaha	165.000.000,00	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	150 Badan Usaha	165.000.000,00	
2.11.07	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**		**Persentase cakupan pengakuan keberadaan MHA , kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**	**33,33 %**	**69.937.600,00**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**		**Persentase cakupan pengakuan keberadaan MHA , kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**	**33,33 %**	**69.937.600,00**	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
2.11.07.1.01	**Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**	**Makassar, Sulawesi Selatan**	**Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang ditetapkan**	**5 Masyarakat Hukum Adat**	**69.937.600,00**	**Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**	**Makassar, Sulawesi Selatan**	**Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang ditetapkan**	**5 Masyarakat Hukum Adat**	**69.937.600,00**	
2.11.07.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	5 Dokumen	69.937.600,00	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	5 Dokumen	69.937.600,00	
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**		**Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya dalam PPLH**	**73,4 %**	**106.403.800,00**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**		**Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya dalam PPLH**	**73,4 %**	**106.403.800,00**	
2.11.08.1.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi**	**Makassar, Sulawesi Selatan**	**Jumlah lembaga atau kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam PPLH**	**1.104 Lembaga**	**106.403.800,00**	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi**	**Makassar, Sulawesi Selatan**	**Jumlah lembaga atau kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam PPLH**	**1.104 Lembaga**	**106.403.800,00**	
2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	24 Dokumen	106.403.800,00	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	24 Dokumen	106.403.800,00	
2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**		**Cakupan pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup**	**88,23 %**	**74.154.800,00**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**		**Cakupan pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup**	**88,23 %**	**74.154.800,00**	
2.11.09.1.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi**	**Makassar, Sulawesi Selatan**	**Jumlah Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi**	**150 Penghargaan**	**74.154.800,00**	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi**	**Makassar, Sulawesi Selatan**	**Jumlah Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi**	**150 Penghargaan**	**74.154.800,00**	
2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	150 Entitas	74.154.800,00	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	150 Entitas	74.154.800,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**		**Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti**	**100% %**	**177.480.000,00**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**		**Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti**	**100% %**	**177.480.000,00**	
2.11.10.1.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi**	**Makassar, Sulawesi Selatan**	**Jumlah rekomendasi tindaklanjut kasus/ perkara LH yang ditangani**	**30 Rekomendasi**	**177.480.000,00**	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi**	**Makassar, Sulawesi Selatan**	**Jumlah rekomendasi tindaklanjut kasus/ perkara LH yang ditangani**	**30 Rekomendasi**	**177.480.000,00**	
2.11.10.1.01.0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	15 Perkara	100.000.000,00	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	15 Perkara	100.000.000,00	
2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	15 Pengaduan	77.480.000,00	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	15 Pengaduan	77.480.000,00	
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**		**Persentase Sampah Perkotaan yang tertangani**	**55 %**	**127.000.000,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**		**Persentase Sampah Perkotaan yang tertangani**	**55 %**	**127.000.000,00**	
2.11.11.1.01	**Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**	**Makassar, Sulawesi Selatan**	**Persentase tahapan Pelaksanaan Pengembangan TPA/TPST Regional**	**30 %**	**127.000.000,00**	**Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**	**Makassar, Sulawesi Selatan**	**Persentase tahapan Pelaksanaan Pengembangan TPA/TPST Regional**	**30 %**	**127.000.000,00**	
2.11.11.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	3 Dokumen	127.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	3 Dokumen	127.000.000,00	
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**Rata-Rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah**	**95 %**	**126.430.056.270,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**Rata-Rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah**	**95 %**	**126.430.056.270,00**	
			Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	**95 %**				**Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah**	**95 %**		
			Persentase Temuan LHP yang Selesai Ditindaklanjuti	**95 %**				**Persentase Temuan LHP yang Selesai Ditindaklanjuti**	**95 %**		
3.28.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Makassar, Sulawesi Selatan**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**25 Dokumen**	**850.000.000,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Makassar, Sulawesi Selatan**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**25 Dokumen**	**850.000.000,00**	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	370.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	370.000.000,00	
3.28.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	100.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	100.000.000,00	
3.28.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00	
3.28.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00	
3.28.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00	
3.28.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	25.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	25.000.000,00	
3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	280.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	280.000.000,00	
3.28.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Makassar, Sulawesi Selatan**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**15 Laporan**	**106.624.839.259,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Makassar, Sulawesi Selatan**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**15 Laporan**	**106.624.839.259,00**	
3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	897 Orang/ Bulan	106.250.113.259,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	897 Orang/ Bulan	106.250.113.259,00	
3.28.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	24 Dokumen	63.500.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	24 Dokumen	63.500.000,00	
3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	64.160.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	64.160.000,00	
3.28.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	150.000.000,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	150.000.000,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	97.066.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	97.066.000,00	
3.28.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Makassar, Sulawesi Selatan**	**Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Dikelola Perangkat Daerah**	**6 Laporan**	**259.691.100,00**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Makassar, Sulawesi Selatan**	**Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Dikelola Perangkat Daerah**	**6 Laporan**	**259.691.100,00**	
3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	2.207.400,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	2.207.400,00	
3.28.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	180.150.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	180.150.000,00	
3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	67.490.000,00	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	67.490.000,00	
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	4.495.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	4.495.000,00	
3.28.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	5.348.700,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	5.348.700,00	
3.28.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Makassar, Sulawesi Selatan**	**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**5 Laporan**	**114.030.000,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Makassar, Sulawesi Selatan**	**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**5 Laporan**	**114.030.000,00**	
3.28.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	24.000.000,00	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	24.000.000,00	
3.28.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	90.030.000,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	90.030.000,00	
3.28.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	0,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	0,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
3.28.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	0,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	0,00	
3.28.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Makassar, Gowa, Jeneponto, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur,**	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**7 Laporan**	**3.673.280.700,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Makassar, Gowa, Jeneponto, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur,**	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**7 Laporan**	**3.673.280.700,00**	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Makassar, Gowa, Jeneponto, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur,	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	47.969.500,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Makassar, Gowa, Jeneponto, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur,	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	47.969.500,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Makassar, Gowa, Jeneponto, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur,	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	851.688.800,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Makassar, Gowa, Jeneponto, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur,	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	851.688.800,00	
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makassar, Gowa, Jeneponto, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur,	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	733.848.400,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makassar, Gowa, Jeneponto, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur,	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	733.848.400,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Makassar, Gowa, Jeneponto, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur,	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	263.082.500,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Makassar, Gowa, Jeneponto, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur,	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	263.082.500,00	
3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makassar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	57.495.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makassar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	57.495.000,00	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makassar, Gowa, Jeneponto, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur,	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 Laporan	1.706.582.100,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makassar, Gowa, Jeneponto, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur,	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 Laporan	1.706.582.100,00	
3.28.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	12.614.400,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	12.614.400,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
3.28.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Makassar, Gowa, Jeneponto, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur,	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**6 Unit**	**131.830.000,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Makassar, Gowa, Jeneponto, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur,	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**6 Unit**	**131.830.000,00**	
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Makassar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	131.830.000,00	Pengadaan Mebel	Makassar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	131.830.000,00	
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Makassar, Gowa, Jeneponto, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur,**	**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4 Laporan**	**10.074.942.504,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Makassar, Gowa, Jeneponto, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur,**	**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4 Laporan**	**10.074.942.504,00**	
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	5.500.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	5.500.000,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Makassar, Gowa, Jeneponto, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	881.882.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Makassar, Gowa, Jeneponto, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	881.882.000,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	9.187.560.504,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	9.187.560.504,00	
3.28.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Makassar, Gowa, Jeneponto, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur**	**Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara**	**6 Laporan**	**4.701.442.707,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Makassar, Gowa, Jeneponto, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur**	**Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara**	**6 Laporan**	**4.701.442.707,00**	
3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	31 Unit	3.768.246.707,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	31 Unit	3.768.246.707,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	165 Unit	543.621.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	165 Unit	543.621.000,00	
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	65.275.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	65.275.000,00	
3.28.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	20.000.000,00	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	20.000.000,00	
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Makassar, Tana Toraja, Enrekang, Pinrang, Sidrap, Jeneponto, Soppeng	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	249.300.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Makassar, Tana Toraja, Enrekang, Pinrang, Sidrap, Jeneponto, Soppeng	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	249.300.000,00	
3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	55.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	55.000.000,00	
3.28.01.1.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah		Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	-	0,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah		Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	-	0,00	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**		**Persentase peningkatan produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu**	**21 %**	**6.927.847.280,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**		**Persentase peningkatan produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu**	**21 %**	**6.927.847.280,00**	
			Persentase akses pengelolaan kawasan hutan lindung dan hutan produksi	**11,91 %**				**Persentase akses pengelolaan kawasan hutan lindung dan hutan produksi**	**11,91 %**		
			Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan	**0,03 %**				**Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan**	**0,03 %**		
			Persentase peningkatan tutupan lahan hasil rehabilitasi diluar kawasan hutan negara	**3,57 %**				**Persentase peningkatan tutupan lahan hasil rehabilitasi diluar kawasan hutan negara**	**3,57 %**		
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Makassar, Sulawesi Selatan**	**Persentase Penataan Pengelolaan Hutan di Wilayah KPH yang Tepat Sasaran**	**-**	**62.413.000,00**	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Makassar, Sulawesi Selatan**	**Persentase Penataan Pengelolaan Hutan di Wilayah KPH yang Tepat Sasaran**	**-**	**62.413.000,00**	
3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen	62.413.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen	62.413.000,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
3.28.03.1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Makassar, Sulawesi Selatan**	**Persentase Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan KPH yang Disahkan**	**100 %**	**122.775.000,00**	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Makassar, Sulawesi Selatan**	**Persentase Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan KPH yang Disahkan**	**100 %**	**122.775.000,00**	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	24 Dokumen	122.775.000,00	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	24 Dokumen	122.775.000,00	
3.28.03.1.03	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**		**Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu dari Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**43.000 M3**	**99.180.000,00**	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**		**Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu dari Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**43.000 M3**	**99.180.000,00**	
			Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu dari Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	**4.000 Ton**				**Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu dari Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**4.000 Ton**		
3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	99.180.000,00	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	99.180.000,00	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Gowa, Takalar, Jeneponto, Bulukumba, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Pangkep, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur,**	**Luas Penanaman di Luar Kawasan Hutan Negara dan Luas Pemeliharaan Tanaman**	**167 Ha**	**4.435.235.880,00**	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Gowa, Takalar, Jeneponto, Bulukumba, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Pangkep, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur,**	**Luas Penanaman di Luar Kawasan Hutan Negara dan Luas Pemeliharaan Tanaman**	**167 Ha**	**4.435.235.880,00**	
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Makassar	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	50.000.000,00	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Makassar	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	50.000.000,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Maros, Pinrang, Selayar, Sidenreng Rappang, Soppeng, Tana Toraja, Toraja Utara, Pangkajene Kepulauan, Wajo, Palopo, Sinjai, Bulukumba, Jeneponto,	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	76 Ha	3.405.265.880,00	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Maros, Pinrang, Selayar, Sidenreng Rappang, Soppeng, Tana Toraja, Toraja Utara, Pangkajene Kepulauan, Wajo, Palopo, Sinjai, Bulukumba, Jeneponto,	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	76 Ha	3.405.265.880,00	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Maros, Pinrang, Selayar, Sidenreng Rappang, Soppeng, Tana Toraja, Toraja Utara, Pangkajene Kepulauan, Wajo, Palopo, Sinjai, Bulukumba, Jeneponto,	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	200 Ha	451.000.000,00	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Maros, Pinrang, Selayar, Sidenreng Rappang, Soppeng, Tana Toraja, Toraja Utara, Pangkajene Kepulauan, Wajo, Palopo, Sinjai, Bulukumba, Jeneponto,	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	200 Ha	451.000.000,00	
3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	83.950.000,00	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	83.950.000,00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Maros, Pinrang, Selayar, Sidenreng Rappang, Soppeng, Tana Toraja, Toraja Utara, Pangkajene Kepulauan, Wajo, Palopo, Sinjai, Bulukumba, Jeneponto,	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	50 Ha	445.020.000,00	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Maros, Pinrang, Selayar, Sidenreng Rappang, Soppeng, Tana Toraja, Toraja Utara, Pangkajene Kepulauan, Wajo, Palopo, Sinjai, Bulukumba, Jeneponto,	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	50 Ha	445.020.000,00	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Gowa, Takalar, Jeneponto, Bulukumba, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Pangkep, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur, Parepare, Makassar,**	**Luas Kawasan Hutan yang Diamankan dari Gangguan**	**1.780.029 Ha**	**1.835.724.400,00**	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Gowa, Takalar, Jeneponto, Bulukumba, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Pangkep, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur, Parepare, Makassar,**	**Luas Kawasan Hutan yang Diamankan dari Gangguan**	**1.780.029 Ha**	**1.835.724.400,00**	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Utara, Luwu Timur, Maros, Pinrang, Kepulauan Selayar, Sidenreng Rappang, Soppeng, Tana Toraja, Toraja Utara, Pangkajene Kepulauan, Wajo, Palopo, Sinjai, Bulukumba, Jeneponto, Makassar, Parepare, Takalar, Bulukumba	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	1.780.029 Ha	1.788.994.400,00	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Utara, Luwu Timur, Maros, Pinrang, Kepulauan Selayar, Sidenreng Rappang, Soppeng, Tana Toraja, Toraja Utara, Pangkajene Kepulauan, Wajo, Palopo, Sinjai, Bulukumba, Jeneponto, Makassar, Parepare, Takalar, Bulukumba	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	1.780.029 Ha	1.788.994.400,00	
3.28.03.1.05.0003	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Wajo	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	2 Operasi	4.250.000,00	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Wajo	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	2 Operasi	4.250.000,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	24 Laporan	42.480.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	24 Laporan	42.480.000,00	
3.28.03.1.07	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**Makassar, Sulawesi Selatan**	**Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu Olahan**	**40.000 M3**	**112.625.000,00**	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**Makassar, Sulawesi Selatan**	**Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu Olahan**	**40.000 M3**	**112.625.000,00**	
3.28.03.1.07.0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	112.625.000,00	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	112.625.000,00	
3.28.03.1.09	**Perbenihan Tanaman Hutan**	**Makassar, Sulawesi Selatan**	**Persentase Benih/ Bibit yang Tersertifikasi**	**70 %**	**259.894.000,00**	**Perbenihan Tanaman Hutan**	**Makassar, Sulawesi Selatan**	**Persentase Benih/ Bibit yang Tersertifikasi**	**70 %**	**259.894.000,00**	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
3.28.03.1.09.0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	3 Unit Usaha	40.000.000,00	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	3 Unit Usaha	40.000.000,00	
3.28.03.1.09.0002	Sertifikasi Sumber Benih	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	3 Sertifikat	40.000.000,00	Sertifikasi Sumber Benih	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	3 Sertifikat	40.000.000,00	
3.28.03.1.09.0004	Sertifikasi Mutu Bibit	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	3 Sertifikat	40.000.000,00	Sertifikasi Mutu Bibit	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	3 Sertifikat	40.000.000,00	
3.28.03.1.09.0006	Pembangunan Sumber Benih	Pinrang, Jeneponto	Luas Sumber Benih yang Dibangun	2 Ha	139.894.000,00	Pembangunan Sumber Benih	Pinrang, Jeneponto	Luas Sumber Benih yang Dibangun	2 Ha	139.894.000,00	
3.28.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**		**Jumlah Laporan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk Dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi yang Terdata**	**1 Laporan**	**55.050.000,00**	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**		**Jumlah Laporan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk Dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi yang Terdata**	**1 Laporan**	**55.050.000,00**	
3.28.04.1.02	**Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi**	**Makassar, Sulawesi Selatan**	**Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk Dalam Lampiran CITES**	**1 Laporan**	**55.050.000,00**	**Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi**	**Makassar, Sulawesi Selatan**	**Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk Dalam Lampiran CITES**	**1 Laporan**	**55.050.000,00**	
3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	55.050.000,00	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	55.050.000,00	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**		**Persentase peningkatan kemampuan (kelola kelembagaan, kelola usaha, kelola kawasan) KTH**	**1,75 %**	**334.504.400,00**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**		**Persentase peningkatan kemampuan (kelola kelembagaan, kelola usaha, kelola kawasan) KTH**	**1,75 %**	**334.504.400,00**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**		**Jumlah KTH Pemula Menjadi KTH Madya**	**24 Kelompok**	**334.504.400,00**	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**		**Jumlah KTH Pemula Menjadi KTH Madya**	**24 Kelompok**	**334.504.400,00**	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
			Jumlah KTH Madya yang Difasilitasi	**4 Kelompok**				**Jumlah KTH Madya yang Difasilitasi**	**4 Kelompok**		
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	243 Orang	65.160.400,00	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	243 Orang	65.160.400,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	33 Kelompok	221.974.800,00	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	33 Kelompok	221.974.800,00	
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Makassar, Sulawesi Selatan	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	2.000 Ha	47.369.200,00	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Makassar, Sulawesi Selatan	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	2.000 Ha	47.369.200,00	
3.28.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**		**Persentase lembaga/ forum DAS yang aktif**	**20,83 %**	**157.250.000,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**		**Persentase lembaga/ forum DAS yang aktif**	**20,83 %**	**157.250.000,00**	
3.28.06.1.01	**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Makassar, Sulawesi Selatan**	**Persentase Forum DAS yang Terbentuk di Kabupaten/ Kota**	**21 %**	**157.250.000,00**	**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Makassar, Sulawesi Selatan**	**Persentase Forum DAS yang Terbentuk di Kabupaten/ Kota**	**21 %**	**157.250.000,00**	
3.28.06.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	4 Dokumen	97.400.000,00	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	4 Dokumen	97.400.000,00	
3.28.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	1 Lembaga	59.850.000,00	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Makassar, Sulawesi Selatan	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	1 Lembaga	59.850.000,00	
JUMLAH					**140.953.788.834,00**	**JUMLAH**				**140.953.788.834,00**	

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Penyusunan perencanaan pembangunan sangat ditentukan dari prosesnya, diantaranya melalui pendekatan *bottom up* dimana perencanaan yang dilakukan dari penjaringan aspirasi masyarakat pemberi gagasan awal terkait kebutuhan nyata pada tingkat masyarakat dan penerima dampak kegiatan pembangunan yang direncanakan. Hasil penjaringan ini, dibahas secara berjenjang mulai dari murenbang desa, musrenbang kecamatan, musrenbang kabupaten serta musrenbang provinsi. Hasil penjaringan aspirasi kebutuhan suatu daerah yang menjadi kewenangan provinsi diusulkan melalui Rakortek provinsi sebagai media penyelasaran usulan berdasarkan kewenangan pengelolaan urusan masing-masing bidang pembangunan

Table 6

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Program Pengelolaan Hutan Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Bantaeng	Luas penanaman diluar kawasan hutan negara	5 ha	Pembuatan hutan rakyat
		Selayar	Luas penanaman diluar kawasan hutan negara	10 ha	Rehabilitasi tanaman mangrove
		Gowa	Luas penanaman diluar kawasan hutan negara	20 ha	Pembuatan hutan rakyat
		Kec. Wattang sidenreng	Luas penanaman diluar kawasan hutan negara	10 ha	Pembuatan hutan rakyat
		Barru	Luas penanaman diluar kawasan hutan negara	10 ha	Pembuatan hutan rakyat
		Maros	Luas penanaman diluar kawasan hutan negara	10 ha	Rehabilitasi mangrove
		Maros	Luas penanaman diluar kawasan hutan negara	10 ha	Pembuatan hutan rakyat
2	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KehatI) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman hayati	Maros	Luas Kebun Raya yang Dikelola lingkup Kewenangan Provinsi	1 unit	Renovasi kantor dan penataan kawasan taman
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup				
	Kegiatan Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Pangkep, Toraja Utara, Palopo, Tana Toraja	Jumlah lokasi pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan LH	4 lokasi	Pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
4	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat Kegiatan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah provinsi	Pangkep	Jumlah Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi		Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk mewujudkan sasaran jangka menengah ditetapkan 7 prioritas nasional sebagai berikut 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, 5) Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Penekanan prioritas pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024-2026 melalui 1) Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif, 2) Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata. 3) Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 4) Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 5) Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan 6) Pembentukan karakter dan Akhlaq SDM yang berintegritas, religious dan loyal serta Profesional.

Rancangan Tema RKP tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7)

percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024.

Sasaran pembangunan tahun 2024 mengupayakan pencapaian target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui:

1. Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Menyelaraskan tema pembangunan RKP dan tema pembangunan Provinsi Sulawesi, maka penyandingan target sasaran dan indikator sebagai berikut :

Sasaran	Indikator	Target RKP	Target RKPD	Satuan
Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan	pertumbuhan ekonomi	5,3 -5,7	5,23-6,71	Persen
	tingkat pengangguran terbuka	5,0-5,7	4,24	Persen
	rasio gini	0,374-0,377	0,361	Nilai
	penurunan emisi gas rumah kaca	27,27		Persen
Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif	indeks pembangunan manusia	73,99-74,02	73,99	Nilai
	tingkat kemiskinan	6,5 – 7,5	8,31	Persen

3.2 Kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Terkait pembangunan sektor kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan

Adapun sasaran strategis kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut :

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

Target sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 7

Sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024

IKU	Sasaran Strategis dan Indikator kinerja	Satuan	Target Kinerja tahun 2024
Sasaran 1 : Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap terhadap Perubahan Iklim			
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69,74
2	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah	%	17,54
3	Penurunan Laju Deforestasi	Juta ha	0,31
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Poin	70
5	Luas Lahan dalam DAS yang Dipulihkan Kondisinya	Ribu ha	230
6	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi *(High Conservation Values)*	Juta ha	18,20
Sasaran 2 : Tercapainya Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan			
7	Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional	Rp trilyun	115
8	Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting	US $ Milyar	16
9	Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK	Rp trilyun	5,5
Sasaran 3 : Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Manfaat Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan			
10	Luas Kawasan hutan dengan Status Penetapan	Juta ha	3
11	Luas Kawasan hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria)	Ribu ha	600
12	Luas Kawasan hutan yang Dikelola oleh Masyarakat	Ha	500
Sasaran 4 : Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing			
13	Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan	Poin	2,5
14	Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum	Kasus	3.220
15	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,70

3.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

Tujuan pembangunan merupakan kondisi yang akan dicapai dalam RPD di Sulawesi Selatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu Tahun 2024 - 2026 dalam bentuk pernyataan–pernyataan dalam mendukung pencapaian visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan.sebagai perwujudan pencapaian misi pembangunan. Sedangkan sasaran pembangunan adalah rumusan

kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan berupa hasil pembangunan daerah.

Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan hingga tahun 2026 merupakan penjabaran dari tujuan yang diformulasi secara terukur, spesifik dan dapat dicapai secara rasional dalam kurun waktu 3 tahun ke depan (2024-2026). Sasaran ini juga juga menampilkan sasaran pokok RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025 yang merupakan tahapan akhir dari pembangunan jangka panjang Sulawesi Selatan.

Rumusan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 berdasarkan Tujuan, dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan 1 adalah Mengoptimalkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, dengan rumusan sasaran sebagai berikut
   a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah
   b. Optimalnya kualitas pelayanan publik
2. Tujuan 2 adalah Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata, dengan rumusan sasaran sebagai berikut:
   a. Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah
3. Tujuan 3 adalah Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, dengan rumusan sasaran sebagai berikut:
   a. Meningkatnya kualitas dan penyerapan tenaga kerja
   b. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah yang berkualitas
   c. Menurunnya angka kemiskinan
   d. Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompetitif dan Inklusif
   e. Meningkatnya Kualitas dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
4. Tujuan 4 adalah: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berketahanan bencana, dengan rumusan sasaran sebagai berikut
   a. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

Tahun 2024 ditetapkan tema pembangunan daerah yaitu:

“ Peningkatan pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan yang inklusif”

Untuk mewujudkan tema pembangunan tersebut, maka ditetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif
2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata
3. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah
4. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata
5. Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
6. Pembentukan karakter dan Akhlaq SDM yang berintegritas, religious dan loyal serta Profesional

Tabel 8

Target kinerja Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Sasaran Prioritas Pembangunan		Target Kinerja tahun 2024
1	Peningkatan tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	Meningkatkan tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik	1	Indeks Reformasi Birokrasi	67,31 (B)
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	2	Nilai Sakip Provinsi	68,52 (B)
		Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	3	Indeks Pelayanan Publik	A- (4,01 – 4,50)
2	Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah	4	Indeks Williamsom	0,67
		Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	5	Indeks Layanan Infrastruktur	81,97
3	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	Meningkatnya produktifitas Nilai Tambah Produk unggulan Daerah	6	Produktifitas total daerah	84.248.042,86
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	7	Pertumbuhan ekonomi	5,23-6,71
4	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata	8	PDRB perkapita ADHB	70,7
			9	Tingkat kemiskinan	8,31
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah	10	Tingkat pembangunan terbuka	4,24
		Menurunnya kesenjangan Pendapatan antar lapisan masyarakat	11	Rasio Gini	0,361
		Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	12	IPM	73,99
		Meningkatnya Kualitas dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	13	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,65
5	Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	14	IKLH	73,57
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	15	Potensi penurunan emisi GRK (juta tin CO2eq)	1.823.583
6	Pembentukan karakter dan Akhlaq SDM yang berintegritas, religious dan loyal serta Profesional	Meningkatnya kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat	16	Angka kriminalitas	8,31

3.4 Sasaran Pembangunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi mendukung pencapaian RPD tahun 2024-2026 pada :

Tabel 9

Keterkaitan RPD dan Renstra

No.	RPD		Renstra	
	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah
2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata	Menurunnya angka kemiskinan	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan	Meningkatnya akses kelola hutan oleh kelompok tani mandiri
3	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan serta Meningkatnya Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	Meningkatnya perbaikan lingkungan hidup
				Menurunnya emisi GRK sektor limbah
			Meningkatkan pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan	Menurunnya emisi GRK sektor kehutanan
				Terpeliharanya fungsi hutan
				Meningkatnya akses para pihak dalam pemanfaatan dan penggunaan hutan
				Terlaksananya konservasi tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi

Tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan didasarkan kepada tujuan RPD, prioritas isu-isu strategis, serta memperhatikan perkembangan dan dinamika kebutuhan masyarakat. adapun tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan 1) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan, 2) Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan serta Meningkatnya Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim 3) Meningkatkan pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan

Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 10

Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target
Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah		Kategori reformasi birokrasi perangkat daerah	Nilai	B
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	BB
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan		Persentase kelembagaan mayarakat dibidang kehutanan yang diberdayakan	Persen	0,14
	Meningkatnya akses kelola hutan oleh kelompok tani mandiri	Persentase kelompok tani mandiri	Persen	3,32
Menurunkan Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan serta Meningkatnya Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	73,57
	Meningkanya perbaikan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Nilai	57,03
		Indeks Kualitas udara	Nilai	89,45
		Indeks Kualitas Air Laut	Nilai	85,68
		Persentase beban pencemaran dari sumber tertentu	Persen	27,35
	Menurunnya potensi penurunan emisi GRK sektor limbah	Persentase potensi penurunan emisi GRK sektor limbah	Persen	0,26
Meningkatkan pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Poin	55,49
		Tata kelola hutan yang berkelanjutan	Persen	5,40
	Menurunnya emisi GRK sektor kehutanan	Jumlah emisi penurunan GRK sektor kehutanan	Ton CO_2 Eq	242.044
		Rekomendasi pemulihan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan atau dalam daerah kabupaten/ kota	Rekomendasi	1
	Terpeliharanya fungsi hutan	Persentase kawasan hutan kewenangan provinsi yang dipertahankan fungsinya	Persen	99,98
	Meningkatnya akses para pihak dalam pemanfaatan dan penggunaan hutan	Persentase akses kelompok masyarakat dan swasta yang melakukan usaha kehutanan	Persen	3,10
	Terlaksananya konservasi tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan atau tidak masuk dalam lampiran (appendix) CITES kewenangan provinsi	Persen	27,80

3.5 Program dan Kegiatan

Rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 mencakup 15 (lima belas) program, 29 (dua puluh sembilan) kegiatan dan 75 (tujuh puluh lima) sub kegiatan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

I. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program Perencanaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk pemenuhan perencanaan lingkungan hidup terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Program ini terdiri atas 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi, dengan sub kegiatan pengendalian pelaksanaan RPPLH Provinsi
2. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi, dengan sub kegiatan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

II. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup bertujuan untuk menurunkan potensi pencemaran lingkungan dari limbah dan peningkatan perbaikan lingkungan hidup. Program ini terdiri atas 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan sub kegiatan :
   a. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
   b. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
   c. Sub kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi

III. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program pengelolaan keanekaragaman hayati bertujuan untuk meningkatan kualitas keanekaragaman hayati. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, dengan sub kegiatan
   a. Sub kegiatan pengelolaan Kebun Raya

IV. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)

Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3) bertujuan untuk mengendalikan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (linbah B3) yang berasal dari aktivitas industri dan medis. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsim, dengan sub kegiatan
   a. Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
   b. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

V. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk meningkatkan ketaatan badan usaha terhadap kewajiban izin kegiatan lingkungan hidup. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :
   a. Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
   b. Sub kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

VI. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH bertujuan untuk fasilitasi Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan

Hak MHA yang terkait dengan PPLH. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH, dengan sub kegiatan:
   a. Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH

VII. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat betujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat/ lembaga kemasyaratan tentang lingkungan hidup. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan
   a. Sub kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

VIII. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat bertujuan pemberian apresiasi dan motivasi kepada Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi atas kinerja Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan :
   a. Sub kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

IX. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup bertujuan untuk penyelesaian permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi, dengan sub kegiatan :
   a. Sub kegiatan Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi
   b. Sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi

X. Program Pengelolaan Persampahan

Program Pengelolaan Persampahan bertujuan untuk pengembangan penanganan sampah di TPA/TPS regional. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan. Adapun kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional, dengan sub kegiatan :
   a. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional

XI. Program Pengelolaan Hutan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan tertib penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hutan alam produksi secara berkelanjutan dan lestari dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi.
   a. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan
2. Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
   a. Sub kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
3. Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
   a. Sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung
4. Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
   a. Sub kegiatan Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
   b. Sub kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara

c. Sub kegiatan Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
d. Sub kegiatan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
e. Sub kegiatan Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan

5. Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
   a. Sub kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan
   b. Sub kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan
   c. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
6. Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
   a. Sub kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
7. Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan
   a. Sub kegiatan Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar
   b. Sub kegiatan Sertifikasi Sumber Benih
   c. Sub kegiatan Sertifikasi Mutu Bibit
   d. Sub kegiatan Pembangunan Sumber Benih

XII. Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Program ini bertujuan untuk menjamin kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam yang berada didalam dan diluar kawasan hutan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi
   a. Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES

XIII. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan dalam rangka pemberdayaan melalui pemberian

peluang kerja dan kesempatan berusaha yang berbasis pelestarian sumber daya hutan dengan kegiatan sebagai berikut. :

1. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.
   a. Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan
   b. Sub kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
   c. Sub kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial

XIV. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Program ini bertujuan pengelolaan kawasan hutan lindung dan konservasi lainnya sehingga dapat memberikan manfaat secara ekonomi, ekologi dan sosial secara optimal dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
   a. Sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS
   b. Sub kegiatan Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS

XV. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan para pihak dan kesiap-siagaan personil dan peralatan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam menurunkan jumlah titik api (hotspot) dengan kegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   a. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
   c. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   d. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   e. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
   f. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   g. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

c. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
d. Sub kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
e. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   a. Sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
   b. Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
   c. Sub kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
   d. Sub kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
   e. Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   a. Sub kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
   b. Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   d. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   e. Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
   f. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   g. Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Sub kegiatan Pengadaan Mebel
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   d. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   c. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   d. Sub kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
   e. Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   f. Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Program dan kegiatan tersebut diatas, merupakan program dan kegiatan yang juga mendukung program kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

Pagu indikatif program dan kegiatan tahun 2024, akan bersumber dari dana APBD, DBH.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 memuat program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian sasaran Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 serta mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintah daerah bidang kehutanan.

Memperhatikan arah kebijakan Nasional tahun 2024 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat prioritas perangkat daerah yang mendukung priositas provinsi dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran *menurunnya angka kemiskinan*, dan sasaran *meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan* serta sasaran *terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pembangunan* yang tertuang pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024

Rencana kerja program dan kegiatan prioritas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yang mendukung prioritas provinsi tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 11 (TC-33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan perkiraan maju Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan				**140.953.788.834,00**				**163.509.657.790,00**	
	Urusan Lingkungan Hidup				**7.049.080.884,00**				**15.836.317.909,00**	
	Urusan Kehutanan				**7.474.651.680,00**				**9.021.430.000,00**	
	Penunjang Dinas LHK				**126.430.056.270,00**				**138.651.909.881,00**	
2.11.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup**		**66,67 %**	**307.517.300,00**			**83,33 %**	**100.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.02.1.01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Telaah RPPLH**		**60 %**	**49.998.800,00**			**80 %**	**100.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	Sulawesi Selatan	3 Dokumen	49.998.800,00	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.02.1.02	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**	**Persentase pemenuhan dokumen KLHS yang dibuat dan dilaksanakan**		**100 %**	**257.518.500,00**			**-**	**0,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	Sulawesi Selatan	1 Dokumen	257.518.500,00	Pendapatan Asli Daerah		-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Potensi emisi GRK dari sektor limbah**		**15257.36 TonCO2e**	**703.619.800,00**			**16435.36 TonCO2e**	**3.650.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
2.11.03.1.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**	**Jumlah lokasi pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan LH**	Gowa, Takalar, Jeneponto, Bulukumba, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Pangkep, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur, Parepare	**24 kabupaten/kota**	**703.619.800,00**			**24 kabupaten/kota**	**2.950.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		3 Dokumen	175.004.800,00	Pendapatan Asli Daerah		3 Dokumen	450.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan		3 Dokumen	58.930.000,00	Pendapatan Asli Daerah		3 Dokumen	1.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan		1.200 Dokumen	469.685.000,00	Pendapatan Asli Daerah		1.300 Dokumen	1.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.03.1.03	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Jumlah lokasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang direhabilitasi**		**1 Lokasi**	**0,00**			**2 Lokasi**	**700.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.03.1.03.0009	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan		0	0,00			2 Kegiatan	700.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase Tingkat pengelolaan Keanekeragaman Hayati (KeHaTi)**		**88,24 %**	**567.964.884,00**			**94,11 %**	**750.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
2.11.04.1.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi**	**Jumlah Keanekaragaman Hayati Provinsi yang dikelola**	**Desa Tompobulu, Kec Tompobulu, Kab Gowa**	**375 Jenis**	**567.964.884,00**			**400 Jenis**	**750.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun		0	0,00			1 Dokumen	250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.04.1.01.0003	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola lingkup Kewenangan Provinsi	Maros, Kec. Tompobulu	27 Ha	567.964.884,00	Pendapatan Asli Daerah		27 Ha	300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.04.1.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi		0	0,00			112 Ha	200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase limbah yang dikelola**		**98,65 %**	**4.700.000.000,00**			**98,66 %**	**7.756.317.909,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.05.1.01	**Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah limbah B3 yang terkelola berdasarkan neraca LB3**	**Makassar, Sulawesi Selatan**	**2.200.000 Ton**	**4.700.000.000,00**			**2.300.000 Ton**	**7.756.317.909,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.05.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Makassar, Sulawesi Selatan	3 Dokumen	100.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah		3 Dokumen	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Makassar, Sulawesi Selatan	250 Dokumen	4.600.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah		250 Dokumen	7.656.317.909,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase tingkat ketaatan pemarakarsa Usaha Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH**		**40 %**	**215.002.700,00**			**40,63 %**	**750.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.06.1.01	**Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	**Jumlah usaha dan/atau Kegiatan yang taat terhadap izin Lingkungan izin PPLH dan PUU LHdan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	**Makassar, Sulawesi Selatan**	**60 Usaha/Kegiatan**	**215.002.700,00**			**65 Usaha/Kegiatan**	**750.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	Makassar, Sulawesi Selatan	10 Dokumen	50.002.700,00	Pendapatan Asli Daerah		10 Dokumen	200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Makassar, Sulawesi Selatan	150 Badan Usaha	165.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah		160 Badan Usaha	550.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.07	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**Persentase cakupan pengakuan keberadaan MHA , kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**		**33,33 %**	**69.937.600,00**			**66,67 %**	**150.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.07.1.01	**Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**	**Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang ditetapkan**	**Makassar, Sulawesi Selatan**	**5 Masyarakat Hukum Adat**	**69.937.600,00**			**10 Masyarakat Hukum Adat**	**150.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
2.11.07.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Makassar, Sulawesi Selatan	5 Dokumen	69.937.600,00	Pendapatan Asli Daerah		10 Dokumen	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Cakupan Lembaga atau Kelompok Masyarakat yang di tingkatkan kapasitasnya dalam PPLH**		**73,4 %**	**106.403.800,00**			**86,7 %**	**900.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.08.1.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah lembaga atau kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam PPLH**	**Makassar, Sulawesi Selatan**	**1.104 Lembaga**	**106.403.800,00**			**1.304 Lembaga**	**900.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Makassar, Sulawesi Selatan	24 Dokumen	106.403.800,00	Pendapatan Asli Daerah		24 Dokumen	250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.08.1.01.0003	Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat		0	0,00			800 Orang	450.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.08.1.01.0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat		0	0,00			480 Keluarga	200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Cakupan pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup**		**88,23 %**	**74.154.800,00**			**94,11 %**	**340.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.09.1.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi**	**Makassar, Sulawesi Selatan**	**150 Penghargaan**	**74.154.800,00**			**160 Penghargaan**	**340.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Makassar, Sulawesi Selatan	150 Entitas	74.154.800,00	Pendapatan Asli Daerah		160 Entitas	340.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Cakupan rekomendasi penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti**		**100% %**	**177.480.000,00**			**100% %**	**640.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.10.1.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi**	**Jumlah rekomendasi tindaklanjut kasus/ perkara LH yang ditangani**	**Makassar, Sulawesi Selatan**	**30 Rekomendasi**	**177.480.000,00**			**32 Rekomendasi**	**640.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.10.1.01.0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	Makassar, Sulawesi Selatan	15 Perkara	100.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah		16 Perkara	320.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	Makassar, Sulawesi Selatan	15 Pengaduan	77.480.000,00	Pendapatan Asli Daerah		16 Pengaduan	320.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Sampah Perkotaan yang tertangani**		**55 %**	**127.000.000,00**			**57 %**	**800.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.11.1.01	**Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**	**Persentase tahapan Pelaksanaan Pengembangan TPA/TPST Regional**	**Makassar, Sulawesi Selatan**	**30 %**	**127.000.000,00**			**40 %**	**800.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.11.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	Makassar, Sulawesi Selatan	3 Dokumen	127.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	800.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.11.11.1.01.0012	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional		-	0,00			-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Rata-Rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah**		**95 %**	**126.430.056.270,00**			**95 %**	**138.651.909.881,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah		**95 %**				**95 %**	**0,00**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
		Persentase Temuan LHP yang Selesai Ditindaklanjuti		**95 %**				**95 %**	**0,00**	
3.28.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Makassar, Sulawesi Selatan**	**25 Dokumen**	**850.000.000,00**			**25 Dokumen**	**975.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makassar, Sulawesi Selatan	2 Dokumen	370.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah		3 Dokumen	340.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Makassar, Sulawesi Selatan	1 Dokumen	100.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Makassar, Sulawesi Selatan	1 Dokumen	25.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Makassar, Sulawesi Selatan	1 Dokumen	25.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Makassar, Sulawesi Selatan	1 Dokumen	25.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Makassar, Sulawesi Selatan	15 Laporan	25.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah		16 Laporan	10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar, Sulawesi Selatan	4 Laporan	280.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah		4 Laporan	450.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Makassar, Sulawesi Selatan**	**15 Laporan**	**106.624.839.259,00**			**15 Laporan**	**119.784.279.279,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Makassar, Sulawesi Selatan	897 Orang/ Bulan	106.250.113.259,00	Pendapatan Asli Daerah		897 Orang/ Bulan	119.366.279.279,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0	0,00			12 Dokumen	36.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Makassar, Sulawesi Selatan	24 Dokumen	63.500.000,00	Pendapatan Asli Daerah		24 Dokumen	24.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Makassar, Sulawesi Selatan	1 Laporan	64.160.000,00	Pendapatan Asli Daerah		1 Laporan	140.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Makassar, Sulawesi Selatan	1 Dokumen	150.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Makassar, Sulawesi Selatan	12 Laporan	97.066.000,00	Pendapatan Asli Daerah		14 Laporan	95.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0	0,00			1 Dokumen	3.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Dikelola Perangkat Daerah**	**Makassar, Sulawesi Selatan**	**6 Laporan**	**259.691.100,00**			**6 Laporan**	**235.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Makassar, Sulawesi Selatan	4 Dokumen	2.207.400,00	Pendapatan Asli Daerah		4 Dokumen	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Makassar, Sulawesi Selatan	6 Dokumen	180.150.000,00	Pendapatan Asli Daerah		10 Dokumen	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
3.28.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0	0,00			1 Laporan	25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Makassar, Sulawesi Selatan	2 Laporan	67.490.000,00	Pendapatan Asli Daerah		2 Laporan	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Makassar, Sulawesi Selatan	2 Laporan	4.495.000,00	Pendapatan Asli Daerah		2 Laporan	5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Makassar, Sulawesi Selatan	4 Laporan	5.348.700,00	Pendapatan Asli Daerah		4 Laporan	5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Pendapatan Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah**		**1.609.030.000 Rp**	**0,00**			**1.609.030.000 Rp**	**46.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah		0	0,00			1 Dokumen	40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		0	0,00			12 Laporan	6.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Makassar, Sulawesi Selatan**	**5 Laporan**	**114.030.000,00**			**7 Laporan**	**853.760.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Makassar, Sulawesi Selatan	2 Unit	24.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah		2 Unit	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		-	0,00			798 Paket	440.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
3.28.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		-	0,00			1 Dokumen	88.760.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		-	0,00			1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Makassar, Sulawesi Selatan	1 Dokumen	90.030.000,00	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		-	0,00			70 Orang	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		-	0,00			165 Orang	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Makassar, Gowa, Jeneponto, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur,**	**7 Laporan**	**3.673.280.700,00**			**7 Laporan**	**1.878.843.500,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Makassar, Gowa, Jeneponto, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur,	1 Paket	47.969.500,00	Pendapatan Asli Daerah		2 Paket	30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Makassar, Gowa, Jeneponto, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur,	1 Paket	851.688.800,00	Pendapatan Asli Daerah		3 Paket	613.843.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Makassar, Gowa, Jeneponto, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur,	3 Paket	733.848.400,00	Pendapatan Asli Daerah		3 Paket	400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Makassar, Gowa, Jeneponto, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur,	5 Paket	263.082.500,00	Pendapatan Asli Daerah		5 Paket	170.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makassar	12 Laporan	57.495.000,00	Pendapatan Asli Daerah		12 Laporan	40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makassar, Gowa, Jeneponto, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur,	180 Laporan	1.706.582.100,00	Pendapatan Asli Daerah		90 Laporan	600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Makassar	2 Dokumen	12.614.400,00	Pendapatan Asli Daerah		5 Dokumen	25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
3.28.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	Makassar, Gowa, Jeneponto, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur,	**6 Unit**	**131.830.000,00**			**20 Unit**	**1.745.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		-	0,00			5 Unit	175.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Makassar	2 Paket	131.830.000,00	Pendapatan Asli Daerah		2 Paket	250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		-	0,00			5 Unit	20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		-	0,00			1 Unit	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	0,00			2 Unit	1.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	0,00			5 Unit	250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
3.28.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Makassar, Gowa, Jeneponto, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur,**	**4 Laporan**	**10.074.942.504,00**			**4 Laporan**	**11.333.127.102,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Makassar	4 Laporan	5.500.000,00	Pendapatan Asli Daerah		4 Laporan	5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Makassar, Gowa, Jeneponto, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur,	12 Laporan	881.882.000,00	Pendapatan Asli Daerah		12 Laporan	551.623.655,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-	0,00			1 Laporan	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Makassar, Sulawesi Selatan	12 Laporan	9.187.560.504,00	Pendapatan Asli Daerah		12 Laporan	10.726.503.447,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
3.28.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara**	**Makassar, Gowa, Jeneponto, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur**	**6 Laporan**	**4.701.442.707,00**			**8 Laporan**	**1.800.900.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Makassar, Sulawesi Selatan	31 Unit	3.768.246.707,00	Pendapatan Asli Daerah		31 Unit	300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Makassar, Sulawesi Selatan	165 Unit	543.621.000,00	Pendapatan Asli Daerah		499 Unit	840.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		-	0,00			5 Unit	2.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Makassar, Sulawesi Selatan	30 Unit	65.275.000,00	Pendapatan Asli Daerah		30 Unit	38.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Makassar, Sulawesi Selatan	1 Unit	20.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah		1 Unit	20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Makassar, Tana Toraja, Enrekang, Pinrang, Sidrap, Jeneponto, Soppeng	8 Unit	249.300.000,00	Pendapatan Asli Daerah		4 Unit	400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Makassar, Sulawesi Selatan	10 Unit	55.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah		4 Unit	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.01.1.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi		-	0,00			20 Ha	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Persentase peningkatan produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu**		**21 %**	**6.927.847.280,00**			**35,23 %**	**6.013.510.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		Persentase akses pengelolaan kawasan hutan lindung dan hutan produksi		**11,91 %**				**11,97 %**		
		Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan		**0,03 %**				**0,03 %**		
		Persentase peningkatan tutupan lahan hasil rehabilitasi diluar kawasan hutan negara		**3,57 %**				**3,63 %**		
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**Persentase Penataan Pengelolaan Hutan di Wilayah KPH yang Tepat Sasaran**	**Makassar, Sulawesi Selatan**	**-**	**62.413.000,00**			**0,01 %**	**125.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok		-	0,00			2 Unit	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	Makassar, Sulawesi Selatan	1 Dokumen	62.413.000,00	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.03.1.02	**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**Persentase Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan KPH yang Disahkan**	**Makassar, Sulawesi Selatan**	**100 %**	**122.775.000,00**			**100 %**	**58.560.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Makassar, Sulawesi Selatan	24 Dokumen	122.775.000,00	Pendapatan Asli Daerah		24 Dokumen	58.560.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
3.28.03.1.03	**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu dari Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**		**43.000 M3**	**99.180.000,00**			**43.000 M3**	**120.029.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu dari Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		**4.000 Ton**				**4.000 Ton**		
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala		-	0,00			1 Dokumen	30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.03.1.03.0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	Makassar, Sulawesi Selatan	1 Dokumen	99.180.000,00	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	30.029.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi			0,00			10 Dokumen	25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.03.1.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung			0,00			10 Dokumen	25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.03.1.03.0006	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan			0,00			1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.03.1.03.0007	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan			0,00			1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**Luas Penanaman di Luar Kawasan Hutan Negara dan Luas Pemeliharaan Tanaman**	**Gowa, Takalar, Jeneponto, Bulukumba, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Pangkep, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur,**	**167 Ha**	**4.435.235.880,00**			**241 Ha**	**3.474.611.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Makassar	1 Dokumen	50.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Maros, Pinrang, Selayar, Sidenreng Rappang, Soppeng, Tana Toraja, Toraja Utara, Pangkajene Kepulauan, Wajo, Palopo, Sinjai, Bulukumba, Jeneponto,	76 Ha	3.405.265.880,00	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		155 Ha	2.150.950.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Maros, Pinrang, Selayar, Sidenreng Rappang, Soppeng, Tana Toraja, Toraja Utara, Pangkajene Kepulauan, Wajo, Palopo, Sinjai, Bulukumba, Jeneponto,	200 Ha	451.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah		10 Ha	113.650.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.03.1.04.0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun		-	0,00			12 Unit	300.996.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Makassar, Sulawesi Selatan	1 Laporan	83.950.000,00	Pendapatan Asli Daerah		1 Laporan	5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Maros, Pinrang, Selayar, Sidenreng Rappang, Soppeng, Tana Toraja, Toraja Utara, Pangkajene Kepulauan, Wajo, Palopo, Sinjai, Bulukumba, Jeneponto,	50 Ha	445.020.000,00	Pendapatan Asli Daerah		24 Ha	854.015.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**Luas Kawasan Hutan yang Diamankan dari Gangguan**	**Gowa, Takalar, Jeneponto, Bulukumba, Selayar, Bantaeng, Sinjai, Maros, Pangkep, Barru, Sidrap, Pinrang, Bone, Wajo, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur, Parepare, Makassar,**	**1.780.029 Ha**	**1.835.724.400,00**			**1.780.029 Ha**	**1.675.310.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Bantaeng, Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Utara, Luwu Timur, Maros, Pinrang, Kepulauan Selayar, Sidenreng Rappang, Soppeng, Tana Toraja, Toraja Utara, Pangkajene Kepulauan, Wajo, Palopo, Sinjai, Bulukumba, Jeneponto, Makassar, Parepare, Takalar, Bulukumba	1.780.029 Ha	1.788.994.400,00	Pendapatan Asli Daerah		1.780.029 Ha	1.152.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.03.1.05.0003	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Wajo	2 Operasi	4.250.000,00	Pendapatan Asli Daerah		2 Operasi	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan			0,00			2 Dokumen	60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Makassar, Sulawesi Selatan	24 Laporan	42.480.000,00	Pendapatan Asli Daerah		24 Laporan	313.310.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.03.1.06	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu dari Perizinan IUIPHHBK**		**1.300 Ton**	**0,00**			**1.300 Ton**	**40.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.03.1.06.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani		-	0,00			1 Unit Managemen	10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.03.1.06.0004	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH		-	0,00			1 Unit Managemen	30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.03.1.07	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu Olahan**	**Makassar, Sulawesi Selatan**	**40.000 M3**	**112.625.000,00**			**40.000 M3**	**207.500.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.03.1.07.0001	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Unit Managemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah		-	0,00			1 Unit Managemen	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.03.1.07.0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Makassar, Sulawesi Selatan	1 Dokumen	112.625.000,00	Pendapatan Asli Daerah		4 Dokumen	147.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.03.1.07.0003	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani		-	0,00			1 Unit Managemen	10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.03.1.09	**Perbenihan Tanaman Hutan**	**Persentase Benih/ Bibit yang Tersertifikasi**	**Makassar, Sulawesi Selatan**	**70 %**	**259.894.000,00**			**70 %**	**312.500.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
3.28.03.1.09.0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	Makassar, Sulawesi Selatan	3 Unit Usaha	40.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah		5 Unit Usaha	37.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.03.1.09.0002	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	Makassar, Sulawesi Selatan	3 Sertifikat	40.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah		7 Sertifikat	52.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.03.1.09.0003	Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan		-	0,00			3 Sertifikat	17.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.03.1.09.0004	Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	Makassar, Sulawesi Selatan	3 Sertifikat	40.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah		7 Sertifikat	52.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.03.1.09.0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar			0,00			12 Laporan	52.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.03.1.09.0006	Pembangunan Sumber Benih	Luas Sumber Benih yang Dibangun	Pinrang, Jeneponto	2 Ha	139.894.000,00	Pendapatan Asli Daerah		1 Ha	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**Jumlah Laporan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk Dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi yang Terdata**		**1 Laporan**	**55.050.000,00**			**1 Laporan**	**150.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.04.1.02	**Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi**	**Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk Dalam Lampiran CITES**	**Makassar, Sulawesi Selatan**	**1 Laporan**	**55.050.000,00**			**1 Laporan**	**150.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Makassar, Sulawesi Selatan	1 Laporan	55.050.000,00	Pendapatan Asli Daerah		1 Laporan	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Persentase peningkatan kemampuan (kelola kelembagaan, kelola usaha, kelola kawasan) KTH**		**1,75 %**	**334.504.400,00**			**2,6 %**	**2.657.920.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**Jumlah KTH Pemula Menjadi KTH Madya**		**24 Kelompok**	**334.504.400,00**			**24 Kelompok**	**2.657.920.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		Jumlah KTH Madya yang Difasilitasi		**4 Kelompok**				**20 Kelompok**		
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Makassar, Sulawesi Selatan	243 Orang	65.160.400,00	Pendapatan Asli Daerah		243 Orang	166.320.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Makassar, Sulawesi Selatan	33 Kelompok	221.974.800,00	Pendapatan Asli Daerah		49 Kelompok	2.291.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Makassar, Sulawesi Selatan	2.000 Ha	47.369.200,00	Pendapatan Asli Daerah		2.000 Ha	200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**Persentase lembaga/ forum DAS yang aktif**		**20,83 %**	**157.250.000,00**			**25 %**	**200.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.06.1.01	**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**Persentase Forum DAS yang Terbentuk di Kabupaten/ Kota**	**Makassar, Sulawesi Selatan**	**21 %**	**157.250.000,00**			**25 %**	**200.000.000,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.06.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	Makassar, Sulawesi Selatan	4 Dokumen	97.400.000,00	Pendapatan Asli Daerah		4 Dokumen	125.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.28.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	Makassar, Sulawesi Selatan	1 Lembaga	59.850.000,00	Pendapatan Asli Daerah		1 Lembaga	75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
JUMLAH					**140.953.788.834,00**				**163.509.657.790,00**	

Dari tabel TC-33 di atas, diuraikan lebih lanjut program dan kegiatan yang mendukung pengarusutamaan gender dan mitigasi perubahan iklim, serta penanggulangan kemiskinan sebagai bentuk komitmen Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam penerapan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah serta upaya penurunan emisi gas rumah kaca, deforestasi dan degradasi hutan, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan usahawana tani.

Program dan kegiatan yang mendukung pengarusutamaan gender pada tahun 2024 yaitu :

1. Program Pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutaan (Program Prioritas)
   a. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan di bidang kehutanan, dengan rencana aksi melalui
      - Peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh kehutanan dan SDM bidang Kehutanan
      - Pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan
      - Penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial
2. Program Pengelolaan Hutan (Program Prioritas)
   a. Kegiatan pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi, dengan rencana aksi melalui
      - Pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan

Program dan kegiatan yang mendukung mitigasi perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon pada tahun 2024

1. Program Pengelolaan Hutan
   a. Kegiatan pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan melalui
      - Penyusunan rencana tahunan rehabilitasi lahan (RTnRL)
      - Pembangunan hutan rakyat di luar kawasan hutan negara
      - Pembangunan penghijuan lingkungan di luar kawasan hutan negara
      - Rehabilitasi mangrove di luar kawasan hutan
   b. Kegiatan pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi, melalui
      - Pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan
      - Pencegahan dan pembatasan kerusakan hasil hutan
      - Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/ penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
2. Program pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) (Program Prioritas)

a. Kegiatan pelaksanaan pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, melalui
   - Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS
   - Pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
   a. Kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati, melalui :
      - Pengeloaan Kebun Raya
4. Program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
   a. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
      - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
      - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
      - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi
5. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
   a. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
      - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Hidup untuk Masyarakat
   a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
      - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
7. Program Pengelolaan Persampahan
   a. Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
      - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional

Program dan kegiatan yang mendukung peningkatan pemberdayaan masyarakat hutan untuk penanggulangan kemiskinan pada tahun 2024

1. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat dibidang Kehutanan
   a. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
      - Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada sasaran kinerja dan prioritas pembangunan sebagaimana tertuang pada RKPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. Rencana kerja tersebut menunjukkan kesesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024.

Untuk itu, dalam rangka mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah tersebut, dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Menyusun dokumen penganggaran dan kinerja mengacu pada dokumen perencanaan stretagis tahunan agar tercipta konsistensi dokumen
2. Melaksanakan rencana kerja tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing
3. Melakukan pengendalian dan pemantauan rencana kerja secara periodik (triwulan, semester)

5.2 Rencana tindak lanjut.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024, menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran (RKA dan DPA tahun 2024) dengan mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024.

Selain itu rencana kerja 2024 menjadi pedoman dalam monitoring, pengendalian dam evaluasi program dan kegiatan.